

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR**

**M. FEBRI ZULKARNAIN**

**E211 13 002**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
2017**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRAK

**M. Febri Zulkarnain (E211 13 002), Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar, xvi + 96 Halaman + 8 Tabel + 3 Gambar + 29 Pustaka (1996-2017) + 7 Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Dr. Deddy T. Tikson, Ph.D dan Dr. Badu, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan sampah di bidang kebersihan lingkungan dengan melihat dari mekanisme dari kemitraan tersebut yang memiliki indikator yaitu di bidang kontrak dan kesepakatan, bantuan dana, struktur, dan insentif menurut konsep hollow state. menggambarkan hasil dari pemusnahan Landfill Gas, dan manfaat bagi masyarakat sekitar TPA Tamangapa maupun masyarakat Pemulung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa di TPA Tamangapa telah dilakukan kerjasama proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas, yang terlibat dalam proyek ini yaitu Pemerintah Kota Makassar yang mengontrol dan mengawasi proyek CDM, PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang mengambil alih pendanaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek pembakaran LFG, dan masyarakat yang turut merasakan dampak positif dari kemitraan ini. Hasil dari kemitraan pengelolaan sampah berupa data Certificate Emission Reduction (CER), dan pembangkit listrik skala kecil untuk penggunaan pada TPA Tamangapa, pembuatan fasilitas umum berupa tempat pembuangan sampah sementara, dan pembinaan masyarakat dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta yang sangat berguna dan bermanfaat demi mewujudkan kebersihan lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia mengalami pemvakuman karena perjanjian ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) yang disetujui PT. Gikoko Kogyo dengan pihak Bank Dunia telah berakhir pada tahun 2015 kemudian pembayaran hasil data CER yang berasal dari hitungan jumlah gas metan yang telah dimusnahkan di TPA Tamangapa belum dapat dilakukan pembayaran oleh pihak Bank Dunia, dan hingga saat inipun proses pembakaran Landfill Gas belum dapat dijalankan untuk sementara waktu. Adapun masalah lain dari penelitian ini adalah semakin menumpuknya sampah di TPA Tamangapa, bau sampah kembali menyengat tidak adanya penerangan jika malam hari dan sarana prasarana yang sudah banyak yang rusak.

**Kata Kunci : Kemitraan, Pengelolaan Sampah**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRACT

**M. Febri Zulkarnain (E211 13 002), Implementation of Public and Private Partnership in Waste Management in Makassar City, xvi + 96 Pages + 8 Table + 3 Drawings + 29 Library (1996-2017) + 7 Appendix + Guided by Prof. Dr. Deddy T. Tikson, Ph.D and Dr. Badu, M.Si**

This study aims to describe the results of the implementation of partnerships in waste management in the field of environmental hygiene by looking at the mechanism of the partnership which has indicators that are in the areas of contract and agreement, funding assistance, structure, and incentives according to the concept of hollow state. Describes the results of the destruction of Landfill Gas, and the benefits to communities around the Tamangapa TPA and the Pemulung community. This research uses descriptive qualitative research approach. Technique of collecting data is done by observation, interview, and documentation. The informants in this study amounted to 8 people.

The results of this study indicate that in TPA Tamangapa, the Clean Development Mechanism (CDM) project of Landfill Gas combustion, involved in this project is the Government of Makassar City, which controls and supervises the CDM project, PT. Gikoko Kogyo Indonesia takes over the funding, development and operation of the LFG combustion project, and the communities that share the positive impact of this partnership. The results of the Waste Management Partnership partnership are Certificate Emission Reduction (CER) data, and small-scale power plants for use at the Tamangapa TPA, the creation of public facilities in the form of temporary garbage disposal, and community development by participating in various training held by private parties which are very useful and Useful for the sake of environmental cleanliness. However, over time PT. Gikoko Kogyo Indonesia experienced vacuum because the ERPA agreement (Emission Reduction Purchase Agreement) approved by PT. Gikoko Kogyo with the World Bank has expired in 2015 and then the payment of CER data from the calculated amount of methane gas that has been destroyed in TPA Tamangapa can not be made by the World Bank, and until now the process of burning Landfill Gas has not been able to run for temporary. The other problem of this research is the more accumulation of garbage in TPA Tamangapa, the smell of garbage again sting the absence of lighting if at night and infrastructure facilities that have been damaged.

**Keywords: Partnership, Waste Management**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Febri Zulkarnain

NIM : E211 13 002

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PELAKSANAAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, Agustus 2017

E211 13 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : M. Febri Zulkamain  
NIM : E211 13 002  
Program Studi : Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi,  
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Juli 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Deddy T. Tikson, M.Sc.  
NIP 19481202 198103 1 001

Dr. Badu, M.Si  
NIP 19621231 198903 1 028

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.  
NIP 19680101 199702 2 001




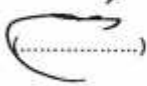



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

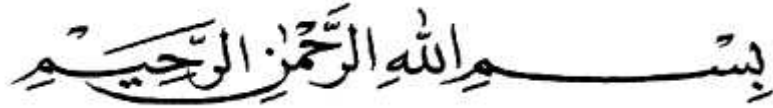
Nama : M. Febri Zulkarnain  
NIM : E211 13 002  
Program Studi : Administrasi Negara  
Judul : Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam  
Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan sesuai  
dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

#### Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Deddy T. Tikson, Ph.D.   
Sekretaris Sidang : Dr. Badu Ahmad, M.Si   
Anggota : 1. Prof. Dr. Haselman, M.Si   
2. Dr. Muhammad Rusdi, M.Si   
3. Dr. Hamsinah, M.Si 

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji bagi **Allah SWT**, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih dibeikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas hasanuddin, Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada **Muhammad SAW**, sang idola terbaik sepanjang zaman.

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Muhammad Aspah** dan ibunda **Indo Ralle**, sembah sujud penulis untuk kalian, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis, kasih sayang yang tiada tara dalam merawat, mendidik, dan mendoakan tiada henti serta selalu memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis.

Terima kasih atas perjuangan dan pergobanan selama ini, semoga ayahanda dan ibunda tercinta senantiasa dilindungi dan di Rahmati oleh **Allah SWT**.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pallubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M,Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh stafnya.
3. Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si** dan bapak **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2015-2020.
4. Bapak **Prof. Dr. Deddy Tiksnawadi Tikson, Ph. D** selaku penasehat akademik dan pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan untuk penulis selama masa perkuliahan serta hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. H. Badu Ahmad , M. Si.** selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Haselman, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si**, dan Ibu **Dr. Hamsinah, M.Si**, Selaku penguji dalam sidang proposal dan



skripsi penulis. Terima kasih atas kesediaannya dalam menghadiri sidang proposal dan skripsi dari penulis dan atas segala masukannya dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh **Dosen Departemen Ilmu Administrasi**. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan. Semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.
8. Seluruh **Staf Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Ani, Ibu Ros, Pak Lili dan Pak Andi) dan **Staf di Lingkup FISIP UNHAS** tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Terima Kasih Kepada **Bapak Andi Gani Sirman** selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta **Karyawan** dan **Staf** di Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dilokasi penelitian ini.
10. Terima Kasih kepada **Dr. Wahyu Nurdiansyah, S.Sos, M, Si.** yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya **“GALAPAGOS 2013” (Suaib, Jo, Amir, Aik, Edi, Enal, Herman, Fajar, Mail, Isman, Zal, Riswan, Jumar, Yayat, Irham, Rama, Udin, Said, Reynaldi, Reza, Rizky, Sakti, Fahrizal David)** yang telah banyak membantu memberi dukungan tiada henti dan selalu ada dalam kondisi apapun untuk penulis.

12. Terima kasih juga kepada sahabat saya **Ashari Prasatia Amirudin (Aik)** atas doa dan dukungan kepada saya selama ini, yang selalu memberikan semangat dan tetap mau berbagi kebahagiaan maupun kesedihan bersama, mau menjadi pendengar setia dan sahabat terbaik saya.
13. Terima kasih kepada sepupu baru saya **Andi Alfiana AS (Bulan)** yang telah membantu penulis demi kelancaran pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
14. Terima Kasih Kepada **Liviah** yang sudah menjadi sahabat dan juga orang yang berpengaruh buat saya di masa-masa perkuliahan, Terima Kasih atas dukungan dan doa yang telah disertai.
15. Terima Kasih teman seperjuangan selama perkuliahan dikampus **RECORD (Regeneration Coloured Of Determiner) 2013** dan yang tidak dapat dituliskan satu persatu terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan, semoga cita-cita kita bersama dapat tercapai, sukses untuk kalian semua dan semoga dihindarkan dari status pengangguran.
16. Terima kasih kepada warga **HUMANIS FISIP UNHAS, PRASASTI 010, BRILIANT 011, RELASI 012, UNION 014, CHAMPION 015, dan FRAME 016** yang telah memberikan ilmu dan pengalaman organisasi bagi penulis selama masa perkuliahan.
17. Terima Kasih kepada teman-teman Komunitas Beatbox Makassar **“MACZ BEATBOX SQUAD”** yang tidak dapat dituliskan satu persatu terima kasih

telah memberikan semangat, menemani, mengisi hari-hari kekosongan, dan telah mendukung penulis hingga selama ini.

18. Terima Kasih kepada teman-teman KKN Gel.93 Kabupaten Wajo Kecamatan Pammana khususnya posko Desa Tadang Palie, (**Kasmanto, Kak Ricky, Syifa, Kia, Inna, Indar, Pak Desa, Bunda, Kak Alang, Aso' Besar, Aso' Biccu, Besse'**) yang telah memberikan kenangan terindah selama 2 bulan mengabdikan di masyarakat.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2017

M. Febri Zulkarnain

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>iv</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>v</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	5
I.3. Tujuan Penelitian .....	6
I.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>Bab II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>7</b>
II.1. Governance dan Kemitraan .....	7
II.2. Model Kemitraan.....	16
II.3. Bentuk-bentuk Kemitraan.....	21
II.4 Hubungan sektor Public-Private.....	23
II.5. Kerangka Pikir .....	28

<b>Bab III Desain dan Prosedur Penelitian.....</b>	<b>33</b>
III.1. Pendekatan Penelitian .....	33
III.2. Desain Penelitian .....	33
III.3. Fokus Penelitian .....	34
III.4. Informan .....	37
III.5. Jenis Data.....	37
III.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
III.7. Teknik Analisis Data .....	39
<b>Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>41</b>
IV.1 Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.....	41
IV.2 PT. Gikoko Kogyo Indonesia .....	44
IV.3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa .....	46
<b>Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>51</b>
V.1 Mekanisme .....	51
V.1.1 Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Bidang Kontrak dan Kesepakatan .....	51
V.1.2 Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Bidang Bantuan Dana .....	54
V.2 Struktur .....	55
V.2.1 Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan sampah melalui proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas (LFG) .....	56

V.3	Insentif .....	76
V.4	Pendapat Masyarakat tentang Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah .....	77
V.4.1	Fasilitas Umum .....	77
V.4.2	Pengurangan Masalah Bau Sampah .....	79
V.4.3	Kegiatan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah dan Swasta .....	80
V.4.4	Kemudahan Beraktifitas pada Malam Hari .....	82
<b>Bab VI</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>85</b>
VI.1	Kesimpulan .....	85
VI.2	Saran .....	87
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>.....</b>	<b>88</b>
<b>Lampiran</b>	<b>.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Keseimbangan Tiga Komponen .....	25
Gambar II.2 Kerangka Pikir.....	32
Gambar V.1 Pengolahan Sampah di TPA Tamangapa.....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Proyek CDM PT. Gikoko Kogyo di Indonesia .....	46
Tabel IV.2 Informasi Terperinci TPA Tamangapa Kota Makassar .....	49
Tabel IV.3 Sarana dan Prasarana TPA Tamangapa .....	50
Tabel V.1 Komposisi Sampah di Kota Makassar.....	57
Tabel V.2 Informasi Luas dan Kapasitas Blok TPA Tamangapa .....	62
Tabel V.3 Perbandingan Pengolahan Sampah Kota Makassar oleh PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam (M3 perhari) dalam Kurun Waktu 5 Tahun dari Tahun 2011-2015.....	65
Tabel V.4 Estimasi Proyek Reduksi TPA Tamangapa .....	67
Tabel V.5 Pencapaian Tingkat Pelayanan Persampahan Tahun 2015 Provinsi Sulawesi Selatan.....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Salah satu masalah perkotaan di Indonesia adalah masalah persampahan. Sampah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga sampah pun menumpuk di sekitar kita. Sebagai instansi pelayanan publik, pemerintah harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya, sehingga masyarakat hidup aman, sejahtera, dan juga sehat.

Adapun masalah pengelolaan sampah yang terjadi khususnya di kota Makassar, yaitu pada sepanjang kanal Buloa-Kaluku Badoa di Kelurahan Baloa, kecamatan Tallo Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), adanya warga yang mengeluhkan sampah belum pernah terangkut dan dibersihkan (23/11/16) (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/06/18/pak-camat-sampah-di-kanal-buloa-kaluku-badoa-nauzubillah-ini-fotonya-liat-ki/>). Selain itu, kondisi dari beberapa lokasi di kota Makassar dan laporan masyarakat mengenai pelayanan persampahan yang diberikan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar. Keterlambatan pengangkutan sampah hingga pengangkutan sampah yang dilakukan hanya sekali dalam seminggu berdampak pada menumpuknya sampah yang berlokasi di Jl. Rajawalidan Jl. Cendrawasih (27/02/17) (<http://makassar.tribunnews.com/2017/02/19/pak-kadis-kok-sampah-jl-rajawali-jl-cendrawasih-belum-diangkut>). Pada kasus lainnya, warga yang bermukim di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) khususnya yang berlokasi di Borong Jambu Kecamatan Manggala mengeluhkan

sampah yang semakin menggunung dan mengambil tanah warga karena lokasi di TPA tidak mampu lagi menampung volume sampah Makassar (27/02/17) (<http://www.beritasatu.com/nasional/256408-makassar-diprediksi-dikepung-sampah-pada-2020.html>).

Ruang lingkup dari pengelolaan sampah ini haruslah dapat bekerja sama dengan baik antar *stakeholder* (unsur) yaitu pemerintah, dan swasta. Seperti yang dikemukakan oleh Savas (1987) pendekatan Kerjasama Pemerintah – Swasta (Public-Private Partnership) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia maka keterlibatan sektor privat penting dalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya adalah urusan pengelolaan persampahan yang sering menjadi masalah di kota-kota besar.

Dengan besarnya beban pengelolaan sampah khususnya di Kota besar dan metropolitan termasuk Kota Makassar, maka berbagai kebijakan dikeluarkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah, badan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kebersihan terutama sampah.

Pasal 26 ayat 1 menyebutkan : “Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.” Sementara pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan : “Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan terutama sampah.”

Kemitraan dalam aspek perspektif New Public Management (NPM) yang dikemukakan oleh Christensen and Lægreid (2001) menuntut birokrasi publik menggunakan cara mengarahkan (steering) daripada mengayuh (rowing). Gagasan NPM menekankan perlu keterlibatan unsur dari stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat) secara holistik dalam mengelola urusan publik khususnya masalah sampah demi terwujudnya kota yang bersih, dan sehat. Kata kunci governance adalah consensus building dan akomodasi kepentingan sebagai basis membangun sinergitas, mendorong penguatan lembaga swasta dan komunitas masyarakat (civil society) untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hubungan antara kekuasaan pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi otonom dan horizontal. Implikasinya terjadi negosiasi kepentingan menjadi sentral dari setiap perumusan, pengambilan dan implementasi kebijakan publik.

Pemerintah harus lebih respon dan inovatif dalam menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat. Persepsi selama ini cenderung menganggap masyarakat yang konsumtif. Tetapi masyarakat harus dilihat sebagai pihak yang memiliki peran sekaligus mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, keterlibatan swasta, masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik khususnya pengelolaan kebersihan terutama sampah menjadi sebuah keharusan. Hal sejalan dengan pandangan Keban (2008), para administrator harus melihat warga negara bukan sebagai pelanggan sehingga dapat saling membagi otoritas dan melonggarkan kendali serta percaya terhadap pentingnya kolaborasi kemitraan. Para administrator harus membangun Trust dan bersikap responsive terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi, tetapi keterlibatan warga masyarakat dilihat sebagai investasi.

Mengatasi permasalahan persampahan ini sebagai faktor yang menentukan kebersihan kota, pemerintah kota tidak bekerja sendiri namun melibatkan swasta dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama. Untuk itu, yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah ingin melihat pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah telah menciptakan hasil kebersihan lingkungan di kota Makassar. Dimana perusahaan PT Gikoko Kogyo Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam Clean Development Mechanism (CDM) project melalui pembakaran Landfill Gas (LFG) mulai Januari 2010 yang berinvestasi di Kota Makassar sesuai Memorandum Of Agreement No. 660/032/S.Perja/DPLHK; No. MOA/05/XII.17/GKI/2007 Pemerintah Kota Makassar dengan PT Gikoko Kogyo Indonesia sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan khususnya sampah di Kota Makassar.

Didalam kerja sama tersebut bertujuan melestarikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di TPA Tamangapa, serta pemerintah kota Makassar menerima hasil berupa royalti melalui pembakaran LFG yang menghasilkan data-

data yang dapat dijual menjadi CER (Certificate Emission Reduction) CER tersebut dibeli oleh sejumlah Negara maju, khusus di Makassar sendiri CER yang dihasilkan dari sampah ini dibeli oleh pihak Belanda melalui Bank Dunia yang oleh Pemkot dijadikan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah kota sendiri menerima kontribusi sebesar 10 % dari hasil penjualan CER tersebut.

Untuk melihat kemitraan ini maka dilakukan penelitian kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar sebagai studi kasus. Berdasarkan pengamatan peneliti masalah dari kemitraan ini yaitu penanganan masalah lingkungan di TPA Tamangapa, masalah yang paling signifikan yang timbul yaitu cairan lindi, bau yang tidak enak, lalat, dan asap dari pembakaran sampah, volume sampah yang menumpuk, dan juga keluhan dari masyarakat dari kemitraan ini adalah penyediaan lapangan kerja yang terkait dengan pembangunan fasilitas pemusnahan LFG di TPA Tamangapa. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang “ **Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar.**”

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

**“Apakah kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar berjalan sesuai dengan Memorandum Of Agreement No. 660/032/S.Perja/DPLHK; No. MOA/05/XII.17/GKI/2007?”**

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Didasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

**“Untuk menjelaskan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar berjalan sesuai dengan Memorandum Of Agreement No. 660/032/S.Perja/DPLHK; No. MOA/05/XII.17/GKI/2007.”**

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Akademik**

Secara umum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai manfaat bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sampah.

#### **2. Praktis**

Manfaat Praktis yang diharapkan output dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1. Governance dan Kemitraan**

Konsep governance tidak sekedar melibatkan pemerintah dan Negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Konsep governance tersebut, menegaskan bahwa dalam tatanan pengelolaan pemerintahan, ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Governance lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni : pemerintah (government), rakyat (citizen), dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta (Taschereau dan Campos, 1997 dalam Thoha, 2003:63). Sedangkan dalam konsep government, Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik.

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Selanjutnya dijelaskan governance merupakan praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Pengertian governance yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:5) mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik,

dan administratif. Economic governance mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi Negara atau berhubungan dengan ekonomi lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Olehnya itu, economic governance memiliki pengaruh atau implikasi terhadap equity, poverty, dan quality of life. Political governance merujuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara/pemerintah yang legitimate dan authoritative. Karena itu, negara terdiri atas tiga cabang pemerintahan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial yang mewakili kepentingan politik pluralis dan membolehkan setiap warga negara memilih secara bebas wakil-wakil mereka. Administrative governance adalah system implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka.

Dari uraian tersebut, maka unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UNDP terdiri atas tiga macam, yaitu the state (Negara/pemerintah), the private sector (swasta), dan civil society organization (organisasi masyarakat). Hubungan diantara ketiga unsur utama dalam penyelenggaraan governance tentunya saling mempengaruhi, saling membutuhkan, atau bahkan saling ketergantungan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Meskipun konsep governance lebih menonjolkan adanya interaksi sinergis antara berbagai aktor (state-society-privat) namun Pierre dan Peters (2000) memiliki pandangan yang agak berbeda mengenai governance. Dalam pandangan mereka, governance tetap merupakan pendekatan yang state-centric karena menurutnya pemerintah tetap merupakan pusat kekuatan dan aktor politik dalam masyarakat



serta lebih berpengaruh dalam pengungkapan kepentingan umum.

Selanjutnya Pierre dan Peters menyatakan keyakinan mereka bahwa peran pemerintah (state) tidak akan berkurang, hanya mengalami transformasi dari peran berbasis kekuasaan konstitusional menjadi peran berbasis koordinasi dan integrasi antara sumber daya publik dan privat. Dengan demikian, proses governance tidak semata-mata dimonopoli oleh Negara, namun juga peran penting sektor swasta dan civil society. Sektor swasta dan pasar memiliki peranan yang penting dalam pembangunan, sedangkan civil society yang merupakan hasil kreasi masyarakat, menyediakan mekanisme check out balances yang penting terhadap kekuasaan pemerintah dan pada sektor swasta, namun mereka juga dapat memberikan kontribusi ataupun memperkuat keduanya.

Dasar pemikiran kemitraan pada dasarnya berada dalam argument tentang peran dan posisi negara yang berelasi dengan masyarakat. Hal ini jelas terlihat perspektif New Public Services oleh Denhardt and Denhardt (2003), bahwa pemenuhan kebutuhan publik (masyarakat) dilakukan bersama-sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Pada tahun 1990-an mulai dirasakan kebutuhan untuk merubah organisasi publik menjadi tidak terlalu hierarkhis, semakin desentralisasi, dan mau menyerahkan peranan dan kebijakan kepada sektor swasta. Perkembangan teori administrasi selanjutnya mengarah pada penggunaan manajemen berbasis pasar dan teknik alokasi sumberdaya, semakin mengandalkan pada organisasi sektor swasta untuk menyampaikan pelayanan publik dan berusaha merampingkan dan melakukan desentralisasi.

Implikasi dari perubahan kondisi tersebut adalah berkembangnya teori Governance dan New Public Management dalam administrasi publik mendorong tata pengelolaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang efektif dan efisien. Kapucu, Yuldahev, Bakiev, (2009) bahwa studi governance mempunyai dua kajian yaitu: (1) institusionalisme yang menegaskan bahwa susunan struktural membentuk perilaku di dalam organisasi, menentukan kinerja organisasi, struktur hubungannya dengan aktor eksternal. (2) studi jaringan, menekankan pada peranan bermacam-macam aktor dalam negosiasi jaringan, implementasi. Hal ini senada dengan Peter dan Pierre (1998), ada empat karakteristik governance yaitu: (a) dominasi jaringan, dominasi kumpulan aktor yang mempengaruhi bagaimana barang dan jasa publik diproduksi, (2) kapasitas pemerintah melakukan pengendalian langsung menurun, (3) campuran dari sumber daya publik dan swasta, (4) menggunakan metode tradisional dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik.

Implementasi teori Governance dan NPM dalam bukunya Osborne dan Gabler (1992) tentang *Reinventing Government* menekankan 10 prinsip dalam mentransformasi birokrasi yang bercirikan kinerja organisasi privat, yaitu: (1) Pemerintah kapitalis; yang lebih mementingkan pengarahan (steering) dari pada pengerahan (rowing), (2) pemerintah milik rakyat; lebih memberi wewenang dari pada melayani, (3) pemerintah kompetitif yang menyuntikan persaingan dalam memberikan pelayanan, (4) pemerintah yang digerakkan oleh misi bukan aturan, (5) pemerintah yang berorientasi hasil, membiayai hasil dan bukan membiayai masukan, (6) pemerintah yang berorientasi pelanggan (masyarakat) bukan

kebutuhan birokrasi, (7) pemerintah wirausaha; menghasilkan ketimbang pembelajakan, (8) pemerintah partisipatif, mencegah dari pada mengobati (9) pemerintah desentralisasi, (10) pemerintah yang berorientasi pada pasar.

Dalam teori Democratic Citizenship oleh Denhardt and Denhardt (2003), mendorong pemerintah untuk memaksimalkan nilai partisipasi dan kemitraan baru (new partnership) kepada implementasi kebijakan publik. Pemerintah memberikan ruang besar pelibatan warga negara untuk berpartisipasi dengan beberapa alasan: (a) partisipasi berbagai pihak akan membantu menemukan harapan yang ingin dicapai oleh warga negara, (b) partisipasi berbagai pihak akan meningkatkan kualitas pelayanan karena pemerintah akan memiliki sumber daya yang lebih besar, informasi, dan kreativitas, (c) partisipasi yang besar akan membantu proses implementasi kebijakan, (d) partisipasi yang besar akan meningkatkan kebutuhan warga negara untuk transparansi dan akuntabilitas, (e) partisipasi yang besar akan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah, (f) partisipasi yang besar akan menumbuhkan masyarakat informasi, (g) partisipasi yang besar akan menciptakan kemungkinan pengembangan kemitraan baru antara pemerintah dan masyarakat, (h) partisipasi yang besar akan menghasilkan publik yang melek informasi.

Menurut Denhardt and Denhardt (2003) kemitraan antara pemerintah dan warga negara, baik sebagai pelaku ekonomi privat maupun sebagai kekuatan civil society, muncul dalam partisipasi yang didalamnya terdapat citizen power. Denhardt and Denhardt mengoperasionalkan basis teori demokrasi citizenship tersebut diatas dalam pendekatan baru administrasi public yang diberi nama New Public Service. Partisipasi aktif adalah suatu hubungan yang berdasarkan pada suatu kemitraan

(partnership) dengan masyarakat dimana warga negara secara aktif mendefinisikan proses dan isi dari pembuatan kebijakan. Di dalam hal ini ada pengakuan kesamaan kedudukan untuk warga negara dalam menentukan agenda, usulan atas pilihan-pilihan kebijakan dan pembentukan dialog-dialog kebijakan. Letak tanggung jawab pengelolaan negara berada pada kekuatan kemitraan antara pemerintah dan warga negara. Walaupun demikian, tanggung jawab akhir dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tetap berada di tangan pemerintah.

Basis pengelolaan dan argument pemerintah untuk bermitra dengan masyarakat dan swasta, bukan dengan pendekatan berbasis pasar (market mechanism) tetapi lebih pada pendekatan berbasis politik. Denhardt and Denhardt (2003) menyebutkan kepentingan utama pemerintah melakukan kemitraan adalah dalam rangka mencapai tujuan kebijakan melalui pengembangan koalisi antara public, lembaga non profit dan swasta untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

Bell dan Watkins (1996) yang menyebutkan bahwa kemitraan tersebut berada dalam ruang pembatasan 4 tipologi hubungan interorganisasi, yaitu : a. Kompetisi, b. Kooperasi, c. Koordinasi, d. Kolaborasi. Menurut Jamal dan Getz (1995) yang diperlukan dalam partnership adalah kolaborasi bukan kooperasi (kerjasama) dalam jangka pendek. Mahmud (2001) dalam kajiannya tentang organisasi kerjasama di Shanghai, menunjukkan bahwa kemitraan merupakan suatu model kerjasama baru, model ini berbeda dengan aliansi strategik. Konsep kemitraan mempunyai pengertian yang berbeda dan mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antar partisipan. Dengan pendekatan ini Shanghai

Cooperation Organization lebih banyak membuat kemitraan dari pada melakukan perluasan organisasi. Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya antara lain (a) persamaan dan organisasi yang lebih landai, (b) hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti caring dan care taking), (c) spiritual yang berbasis alamiah, (d) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan (e) persamaan dan keadilan gender.

Masa sekarang model komando dan kontrol ini selain tidak sesuai lagi juga makin menjadi tidak berlaku. Kekakuan birokrasi bersifat mematikan organisasi yang berkehendak mengarahkan secara efektif di lingkungan yang cepat berubah dimana inovasi dan fleksibilitas merupakan faktor-faktor kunci. Dalam organisasi kemitraan terkait dengan pola pengorganisasian yang mengarah pada bentuk hirarki yang lebih landai dan tidak kaku, perubahan dalam peranan manajer, dari peran “polisi” ke arah peranan fasilitator dan memberi dukungan. Dari power over menjadi power to/with team work (kerja tim), diversity (keberagaman), gender balance (keseimbangan gender), kreativitas dan kewirausahaan.

Dalam Kemitraan di sektor publik, Bryden et al. (1998) pernah mengemukakan bahwa keunggulan-keunggulan kemitraan lokal terletak pada : (a) persiapan dari strategi setempat yang melihat seluruh kebutuhan bagi pembangunan pedesaan di wilayah tersebut, dan kebijakan-kebijakan yang tersedia untuk mencapai semua ini; (b) pertimbangan tentang cara pemberian pelayanan yang lebih efektif, termasuk kerja bersama diantara mitra, penggunaan bersama atas gedung-gedung atau sumber daya lainnya, dan pendekatan terpadu terhadap pemberian informasi kepada orang-orang setempat, dan (c) penyediaan sebuah

pusat untuk promosi tentang prakarsa masyarakat (community-led initiatives)(Bryden et al, 1998:96).

Syarat dasar bagi kemitraan adalah adanya prinsip saling menguntungkan (win-win solutions atau positive sum game). Konsep kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dikenal juga sebagai kebijakan privatisasi/swastanisasi. Kemudian dijelaskan bahwa inti dari kemitraan ini adalah pemberian kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan dalam komponen kegiatan pembiayaan, pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian, pemeliharaan atau pengelolaan pelayanan publik, melalui cara :

- a. Memberikan kewenangan pada swasta untuk membangun, memakai, memanfaatkan, melaksanakan atau mengelola pekerjaan, yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan tarif tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Hak yang diberikan dalam memanfaatkan kekayaan milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dengan berdiri sendiri, bekerja sama atau berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.
- c. Kegiatan dalam bentuk pola kerjasama kontrak jangka panjang dengan pemberian konsesi pekerjaan kepada pihak swasta dan memungkinkan pelaksanaan melalui pembiayaan proyek dengan investasi besar dan jangka pengembalian yang panjang.

Kemitraan menurut Ramelan (1997) adalah pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian infrastruktur. Oleh karena, konsep kemitraan publik-swasta diarahkan menuju ke pengertian Rondinelli (1998), yang menyatakan bahwa jika kemitraan publik-swasta diinginkan berhasil, maka pemerintah harus : (1) melakukan reformasi hukum yang memadai untuk mengijinkan sektor swasta beroperasi secara efisien dan efektif; (2) mengembangkan dan menjalankan peraturan yang jelas pada para investor swasta; (3) menghapus batasan yang tidak diperlukan dalam hal kemampuan bersaing perusahaan swasta di pasar tersebut; (4) memungkinkan terjadinya likuidasi atau kebangkrutan yang tidak bisa dikomersilkan atau diswastanisasi; (5) memperluas peluang bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan kemampuan manajemen; (6) membuat insentif dan jaminan untuk melindungi karyawan dalam negeri; (7) mereformasi dan merestrukturisasi yang tidak dijual dengan cepat; dan (8) menentukan kembali peran pemerintah secara langsung dari layanan produksi dan pengiriman untuk memudahkan pengaturan ketetapan layanan di sektor swasta.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI, (Ditjen P2L & PM, 2004)) meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner”.
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

## **II.2. Model Kemitraan**

Provan dan Milward (1994), memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essential



saja. Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta :

## 1. Mekanisme

Mekanisme yang terdapat dalam Hollow State yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam Hollow State memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk didalamnya adalah bantuan dana, kontrak dan kesepakatan, dan tidak berdasarkan semata-mata pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi mekanisme dalam Hollow State melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan tersebut dilihat dari perspektif Hollow State bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerjasama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

## 2. Struktur

Tipe struktur dalam teori konsep Hollow State berfokus pada suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam Hollow State tidak ada pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor

yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori Hollow State menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien. Dalam pembahasan konsep Hollow State, jaringan yang menjadi arus utama terpisahkan dari kelemahan. Karena kebutuhannya untuk berkoordinasi dalam joint produksi sehingga hal ini yang menyebabkan jaringan memiliki kondisi yang tidak stabil. Pimpinan (manager) sering diperhadapkan pada problem yang bermuara pada insabilitas negosiasi, koordinasi, pengawasan, membuat pihak ketiga tetap bertanggung jawab. Shared power akan menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak.

### 3. Insentif

Pengertian insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini mengemukakan bahwa pendanaan yang baik menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kelembagaan atau kemitraan yang sesuai stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh. Sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan modal dan

meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau pendanaan tidak cukup, mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya mampu untuk memecahkan masalah dan menyepakati pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki hasil yang baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk investor yang berarti bahwa jika mereka berinvestasi untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan untuk tawaran setiap tiga tahun adalah cara untuk mencegah perilaku individu yang mungkin rasional dalam jangka pendek tetapi secara kolektif akan merusak dalam jangka panjang. Hal tersebut memberikan insentif kepada provider untuk mengatasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka. Ciri lain dari hollow state adalah menjadikan sektor swasta sebagai sebuah model kesuksesan dan pengelolaan terhadap lingkungan organisasi publik.

Secara umum, model kemitraan dalam sektor kesehatan dikelompokkan menjadi dua (Notoadmodjo, 2007) yaitu:

#### 1. Model I

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (networking) atau building linkages. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.

#### 2. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

#### 1. Potential Partnership

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

#### 2. Nascent Partnership

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.

#### 3. Complementary Partnership

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization.

#### 4. Synergistic Partnership

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

### **II.3. Bentuk-bentuk Kemitraan**

Kemitraan usaha baik swasta besar dengan swasta kecil atau pemerintah dengan swasta atau pemerintah dan pemerintah yang kukuh adalah kerjasama yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan kerjasama antar pelaku ekonomi dan penyelenggara pembangunan termasuk pemerintah. Selanjutnya disebutkan bentuk-bentuk kemitraan yakni kemitraan makro, kemitraan antar sektor, kemitraan mikro/kemitraan sektoral dalam satu sektor, kemitraan regional dalam satu wilayah, dan kemitraan nasional yang strategis. Kemitraan secara operasional yakni kemitraan pembiayaan, atau kerjasama pengadaan modal sedangkan bentuk kemitraan secara teknis antara lain adalah BOO, BOT, atau tukar guling. (Mustopaadidjaja, 1995).

Atas dasar kemitraan diatas, dapat dilakukan dan dikembangkan bentuk gabungan berikut ini :

- a. Build, Operate, Transfer (BOT), pihak penyelenggara proyek (swasta) melaksanakan kegiatan konstruksi (termasuk pembiayaan suatu fasilitas infrastruktur), termasuk proses pengoperasian dan pemeliharaan proyek. Kemudian proyek dioperasikan oleh pihak swasta selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati berakhir, pihak penyelenggara proyek harus menyerahkan seluruh fasilitas aset proyek kepada Pemerintah Daerah.
- b. Build and Transfer, pihak penyelenggara proyek (swasta) melaksanakan konstruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu,

yang disepakati dalam kontrak perjanjian. Setelah konstruksi proyek selesai pihak penyelenggara menyerahkan proyek kepada pemerintah yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Kemudian pemerintah diwajibkan membayar pihak penyelenggara sebesar nilai investasi yang dikeluarkan untuk proyek ditambah nilai pengembalian yang wajar bagi investasi yang dilakukan.

- c. Build-Own-Operate, pihak penyelenggara proyek (swasta) diberi kewenangan untuk membangun (dan membiayai), mengoperasikan, dan memelihara suatu fasilitas infrastruktur (proyek). Sebagai imbalannya, pihak penyelenggara diberi kewenangan untuk mendapatkan biaya pengembalian investasi, serta biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk keuntungan yang wajar dengan cara menarik biaya dari para pemakai jasa fasilitas infrastruktur tersebut.
- d. Build-Own-Lease, pihak investor melaksanakan pembangunan diatas tanah milik pemerintah, setelah selesai proyek langsung diserahkan eara hibah kepada Pemerintah, namun pihak investor (swasta) itu memperoleh hak opsi untuk menyewakan bangunan komersial tersebut.
- e. Management Contract, pemerintah mengalihkan seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan suatu bidang kegiatan tertentu kepada pihak swasta.
- f. Service contract, pemerintah menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta, sedangkan swasta harus memberikan jasa-jasa tertentu pada pemerintah.

- g. Bagi hasil, hampir sama dengan bentuk *management contract*, namun selain memperoleh fee dari jasa yang diberikan, pihak swasta juga berhak untuk menerima bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh.
- h. Leasing, pemerintah menyewakan fasilitas tertentu kepada swasta. Pada perjanjian ini pihak swasta wajib memikul resiko komersial dari kegiatan yang dijalankannya.
- i. Konsesi, pemerintah memberikan izin kepada swasta untuk melakukan suatu kegiatan eksploitasi, sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk membayar fee atau retribusi kepada Pemerintah.

#### **II.4. Hubungan Sektor Publik-Privat**

Domain pemerintah (state) menjadi domain yang paling memegang peranan penting di antara ketiga domain dalam mewujudkan good governance. Memegang peranan penting yang dimaksud bukan berarti state memiliki kekuasaan yang lebih besar dan mendominasi domain-domain lainnya, melainkan karena pentingnya fungsi pengaturan yang memfasilitasi berkembangnya domain sector swasta dan masyarakat (society), serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari. Oleh karena itu, menurut Adisasmita (2010) upaya-upaya perwujudan kearah good governance dapat dimulai

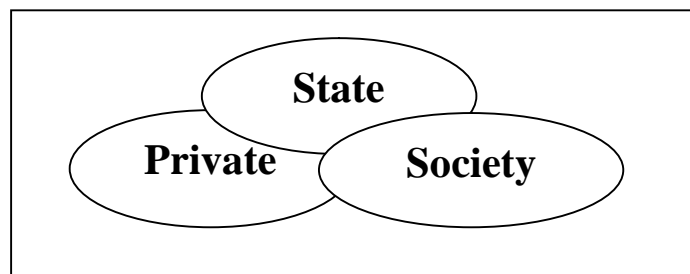
dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan Negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud good governance. Sektor swasta secara umum dapat digolongkan menjadi : (1) Private for profit organization, termasuk dalam kategori ini adalah organisasi-organisasi yang bergerak di bidang bisnis klasik, baik yang berskala kecil maupun berskala besar, serta organisasi-organisasi bisnis modern yang berskala internasional dengan berbasis bisnis jaringan; dan (2) Private for non-profit organization, termasuk dalam organisasi ini adalah organisasi-organisasi non pemerintahan yang bersifat independen, yaitu lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan-yayasan sosial, asosiasi-asosiasi independen lainnya yang memposisikan dirinya bukan sebagai profit oriented organization meskipun mereka adalah organisasi swasta.

Dalam konsep governance, keberadaan sektor swasta merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh pemerintah, sehingga kedudukan diantara mereka adalah sejajar. Peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam tata pemerintahan yang baik (Thoha, 2003). Pemerintah tidak lagi tampil menjadi pusat kekuasaan yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat melainkan merupakan fasilitator dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik. Sedangkan sektor swasta semakin dituntut perannya sebagai producer atau provider yang memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Effendi, 2001).



Menurut Hall, M. (1999) Pola kemitraan ini harus dibangun dalam model sinergisitas yang mencakup pihak-pihak yang berkompeten. Secara umum model yang direkomendasikan dalam pola-pola kemitraan, adalah dengan memberikan peran yang setara antara tiga actor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan governance melibatkan tiga unsur utama (domain), yaitu state (Negara atau pemerintahan), private sector (sector swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Taschereau dan Champos. 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha, 2003). Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.



**GambarII.1 : Keseimbangan Tiga Komponen**

**Sumber : Thoha, (2003:74)**

Pemerintah atau Negara, sebagai satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari

masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Masyarakat (society) dalam konsep governance terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Salah satu lembaga sektor publik yang memberikan kontribusi pada terciptanya sinergi antara pilar governance adalah governance bodies yaitu suatu lembaga non pemerintah yang diberi mandat dan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang tertentu. Governance bodies memiliki anggota yang menggambarkan pilar dari governance seperti unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha (Dwiyanto, 2010). Konteks hubungan yang demikian merupakan refleksi saling ketergantungan dalam penyediaan input atau sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak yang jika diintegrasikan akan sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Privatisasi atau swastanisasi dengan demikian mengandung arti suatu keterkaitan atau keterlibatan swasta dalam ikut melakukan pelayanan atau urusan publik, ikut melayani tugas-tugas pelayanan yang biasa dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya dikemukakan Savas (1987) bahwa privatisasi adalah kunci untuk pemerintahan yang terbatas dan lebih baik, terbatas dalam ukuran, ruang lingkup, dan kekuasaan relatifnya terhadap institusi-institusi

lain dalam masyarakat dan lebih baik dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi secara efisien, efektif, dan berkeadilan.

Menurut Mahsun (2006) memberikan pemahaman terhadap sektor publik sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara. Luasnya ruang lingkup sektor publik menyebabkan dalam menyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar dengan regulasi dan pengawasan tetap dilakukan pemerintah. Anggapan organisasi sektor publik non-profit menjadi tidak tepat karena ada organisasi sektor publik yang bertipe quasi non profit yaitu mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun memiliki motif laba untuk keberlangsungan organisasi dan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan negara atau daerah. Organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial atau organisasi non profit, dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. Organisasi publik merupakan organisasi yang berhubungan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan lain yang diatur dengan hukum.

Cakupan sektor publik di Indonesia adalah lembaga pemerintahan pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Organisasi sektor dibutuhkan untuk menjamin bahwa pelayanan publik dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata serta memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan organisasi sektor privat/bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan mekanisme pasar. Organisasi sektor privat bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi.

## **II.5. Kerangka Pikir**

Pengelolaan kebersihan berbasis kemitraan pemerintah, dan swasta dapat menciptakan kebersihan lingkungan dari kemitraan tersebut penulis memakai teori dari Provan dan Milward (1994), memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essential saja. Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta :

### **1. Mekanisme**

Mekanisme yang terdapat dalam Hollow State yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam Hollow State memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk didalamnya adalah bantuan

dana, kontrak dan kesepakatan, dan tidak berdasarkan semata-mata pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi mekanisme dalam Hollow State melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan tersebut dilihat dari perspektif Hollow State bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerjasama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

## 2. Struktur

Tipe struktur dalam teori konsep Hollow State berfokus pada suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam Hollow State tidak ada pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori Hollow State menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien. Dalam pembahasan konsep Hollow State, jaringan yang menjadi arus utama terpisahkan dari kelemahan. Karena kebutuhannya untuk berkoordinasi dalam join produksi sehingga hal ini yang menyebabkan jaringan memiliki kondisi yang tidak stabil. Pimpinan (manager) sering diperhadapkan pada problem yang bermuara pada insabilitas negosiasi, koordinasi, pengawasan, membuat pihak ketiga tetap

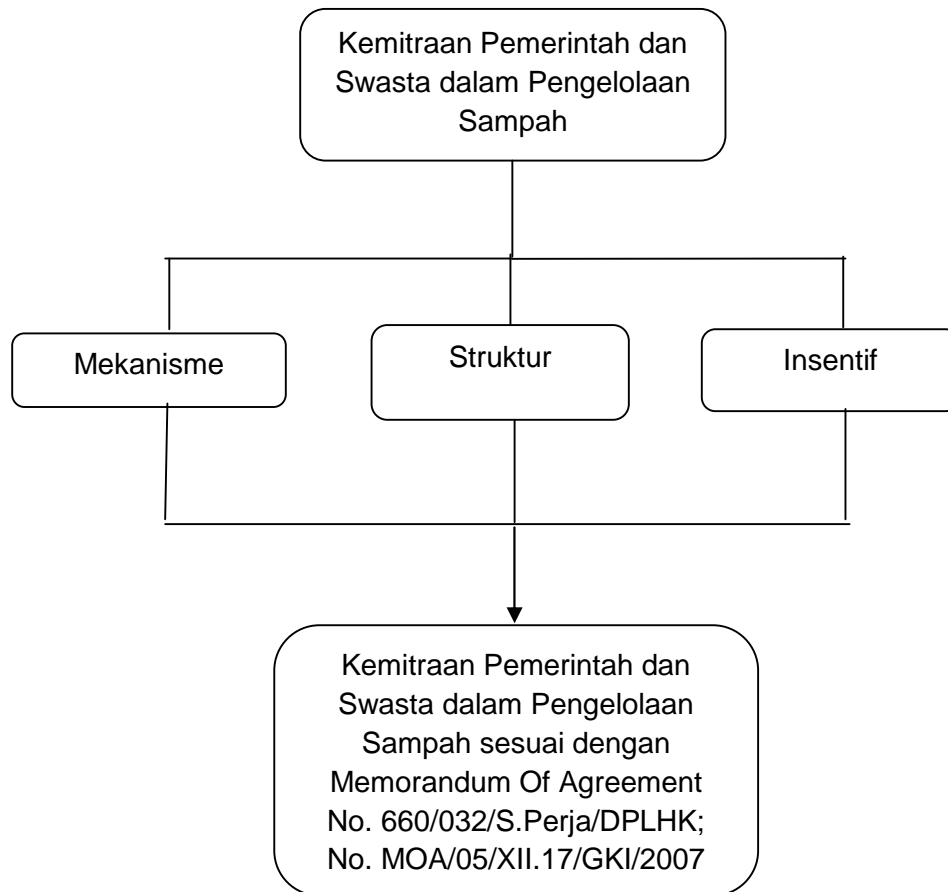
bertanggung jawab. Shared power akan menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak.

### 3. Insentif

Pengertian insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini mengemukakan bahwa pendanaan yang baik menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kelembagaan atau kemitraan yang sesuai stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh. Sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan modal dan meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau pendanaan tidak cukup, mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya mampu untuk memecahkan masalah dan menyepakati pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki hasil yang baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk investor yang berarti bahwa jika mereka berinvestasi untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan untuk tawaran setiap tiga tahun adalah cara untuk mencegah perilaku individu yang mungkin rasional dalam jangka pendek tetapi secara kolektif akan merusak dalam jangka panjang. Hal tersebut

memberikan insentif kepada provider untuk mengatasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka. Ciri lain dari hollow state adalah menjadikan sektor swasta sebagai sebuah model kesuksesan dan pengelolaan terhadap lingkungan organisasi publik.

Dari teori tersebut penulis mengambil salah satu konsep yaitu mekanisme dengan indikatornya yaitu berupa bantuan dana, kontrak, dan kesepakatan, dengan memakai indikator tersebut maka penulis dapat melihat apakah kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah telah sesuai dengan MOU. Maka diambillah kerangka pikir sebagai berikut :



**Gambar II.2 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan metodologi penelitian yang digunakan untuk meneliti tentang pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar dalam kebersihan lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan alasan pemilihan pendekatan penelitian, desain penelitian, fokus penelitian, informan, jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### **III.1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, penulis menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar dalam bidang kebersihan lingkungan.

#### **III.2. Desain Penelitian**

Adapun desain penelitian yang akan penulis lakukan ialah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail (Pasolong, 2013:75). Kasus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar dalam bidang kebersihan lingkungan.

### **III.3. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dari kemitraan ini yaitu penanganan masalah lingkungan di TPA Tamangapa, masalah yang paling signifikan yang timbul yaitu cairan lindi, bau yang tidak enak, lalat, dan asap dari pembakaran sampah, volume sampah yang menumpuk, dan juga keluhan dari masyarakat dari kemitraan ini adalah penyediaan lapangan kerja yang terkait dengan pembangunan fasilitas pemusnahan LFG di TPA Tamangapa. Selanjutnya, teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori dari Provan dan Milward (1994) memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essential saja. Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta :

#### **1. Mekanisme**

Mekanisme yang terdapat dalam Hollow State yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam Hollow State memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk didalamnya adalah bantuan dana, kontrak dan kesepakatan, dan tidak berdasarkan semata-mata pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi mekanisme dalam Hollow State melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan

mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan tersebut dilihat dari perspektif Hollow State bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerjasama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

## 2. Struktur

Tipe struktur dalam teori konsep Hollow State berfokus pada suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam Hollow State tidak ada pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori Hollow State menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien. Dalam pembahasan konsep Hollow State, jaringan yang menjadi arus utama terpisahkan dari kelemahan. Karena kebutuhannya untuk berkoordinasi dalam joint produksi sehingga hal ini yang menyebabkan jaringan memiliki kondisi yang tidak stabil. Pimpinan (manager) sering diperhadapkan pada problem yang bermuara pada insabilitas negosiasi, koordinasi, pengawasan, membuat pihak ketiga tetap bertanggung jawab. Shared power akan menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak.

### 3. Insentif

Pengertian insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini mengemukakan bahwa pendanaan yang baik menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kelembagaan atau kemitraan yang sesuai stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh. Sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan modal dan meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau pendanaan tidak cukup, mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya mampu untuk memecahkan masalah dan menyepakati pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki hasil yang baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk investor yang berarti bahwa jika mereka berinvestasi untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan untuk tawaran setiap tiga tahun adalah cara untuk mencegah perilaku individu yang mungkin rasional dalam jangka pendek tetapi secara kolektif akan merusak dalam jangka panjang. Hal tersebut memberikan insentif kepada provider untuk mengatasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka. Ciri lain dari hollow state adalah menjadikan sektor swasta

sebagai sebuah model kesuksesan dan pengelolaan terhadap lingkungan organisasi publik.

#### **III.4. Informan**

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini, informannya yaitu Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kepala Konstruksi Perusahaan, Kepala UPTD TPA Tamangapa beserta staf pegawai, camat, lurah, tokoh masyarakat yang peduli pentingnya kebersihan, masyarakat umum (RW dan RT).

#### **III.5. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer : Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber dan informan yang mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar. Narasumber yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kepala Konstruksi Perusahaan, Kepala UPTD TPA Tamangapa beserta staf pegawai, camat, lurah, tokoh masyarakat yang peduli pentingnya kebersihan, masyarakat umum (RW dan RT). Guna memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada informan.

2. Data Sekunder : Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kemitraan

pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar, buku-buku, literatur, laporan penelitian yang terkait dengan masalah kemitraan. Guna memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen.

### **III.6. Teknik Pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan); Dalam penelitian ini, penulis mengamati, merekam, dan mencatat fenomena atau aktifitas yang sehubungan dengan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar dalam bidang kebersihan lingkungan.
2. Wawancara; Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan orang yang mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar dalam bidang kebersihan lingkungan.
3. Studi Dokumen; Teknik mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen tersebut berupa buku-buku, literatur, laporan penelitian yang terkait dengan masalah kemitraan.

### **III.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:91) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap keyinforman yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung di lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan yang diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validitasnya.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Fokus penelitian yang akan peneliti teliti adalah hasil pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah telah berjalan sesuai dengan MOU. Terkait dengan fokus penelitian tersebut maka peneliti menetapkan lokasi penelitian yang berhubungan dengan pihak pemerintah yakni Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, pihak swasta perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **IV.1. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar**

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar yang memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Tugas Pokok : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu, merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan, pemakaman dan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA).

b. Fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
2. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi kota), penyelenggaraan kebersihan/ persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
3. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan, kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
4. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan, kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
5. Pelayanan perizinan pemakaman.
6. Pelaksanaan perencanaan dari pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

7. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

8. Pembinaan unit pelaksana teknis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dibantu oleh sebanyak 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1 (satu) Sekretaris serta 2 (dua) Kepala UPTD. Dari Tugas Pokok dan Fungsi diatas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar juga memiliki Visi dan Misi, adapun Visi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

a. Visi : Mewujudkan Kota Makassar Asri dan Nyaman Berkelas Dunia

B. Misi :

1. Mengurangi laju timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan/kebersihan yang berkelanjutan (Zero Waste Management).
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
3. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip good and cooperate governance.

5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persampahan/kebersihan dan pengelolaan RTH.
6. Menerapkan inovasi teknologi hijau dalam pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

#### **IV.2. PT. Gikoko Kogyo Indonesia**

PT. Gikoko Kogyo Indonesia adalah sebuah perusahaan rekayasa dan manufaktur yang mengkhususkan diri menyediakan layanan di sektor sistem air bersih, sumber daya biomassa, dan pengembangan kredit karbon. PT. Gikoko memiliki pengetahuan khusus dalam skema insentif CDM Protokol Kyoto dan jaringan dengan pasar pembiayaan karbon dan mengembangkan Public Private Partnership dengan pemerintah lokal dalam sektor pengelolaan limbah. PT. Gikoko Kogyo Indonesia adalah perusahaan Engineering dengan kemampuan manufaktur sepenuhnya beroperasi di Indonesia sejak tahun 1993. Pemegang saham utama adalah Jepang dan investor Hongkong. Gikoko bekerja untuk masa depan yang berkelanjutan dengan teknologi inovatif.

Filosofi Gikoko Indonesia adalah untuk secara aktif mengejar sertifikasi yang menambah nilai nyata untuk lingkungan yang membantu perusahaan untuk mempertahankan reputasi kepengurusan perusahaan yang baik. Gikoko telah bersertifikat ISO 9001 sejak November 2000 dan Gikoko telah menerima sertifikasi OHSAS 18001 (Standar Kesehatan dan Keselamatan) pada Januari 2007. Gikoko secara aktif mengejar ISO 14001 (Standar Manajemen Lingkungan) sertifikasi.

PT. Gikoko Kogyo Indonesia saat lebih dari 150 teknisi yang terampil, pengrajin dan insinyur yang berkomitmen untuk lebih mengembangkan keterampilan kesadaran keselamatan dan praktek operasi yang baik di pabrik sendiri dan memfasilitasi pelayanan untuk pelanggan secara umum. Komitmen ini berlaku jika dilihat dari sertifikasi telah menunjukkan komitmen Gikoko secara keseluruhan untuk menyediakan pelayanan teknis terbaik dengan cara yang mencerminkan standar tinggi dimana mereka sendiri beroperasi.

Manajemen Gikoko sendiri ini telah membuat investasi yang jelas dan substansial di masa depan. PT. Gikoko Kogyo juga mengembangkan kredit karbon dari pabrik kelapa sawit, sistem organik efluen, air limbah pengobatan, dan pengolahan makanan pulp dan pengolahan makanan pulp serta bergerak juga di bidang industri kertas.

Selanjutnya khusus untuk inovatif skema kredit karbon dalam pengelolaan TPA. PT. Gikoko Kogyo Indonesia bekerja sama dengan bagian keuangan karbon bank dunia mulai dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan proyek Clean Development Mechanism. Adapun proyek CDM yang diaplikasikan oleh PT. Gikoko Kogyo di beberapa daerah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.1**

**Proyek CDM PT. Gikoko Kogyo di Indonesia**

<b>Tanggal Registrasi</b>	<b>Proyek PT. Gikoko Kogyo</b>	<b>Pihak Lain</b>	<b>Metodologi</b>
7September2009	Gikoko-Makassar-LFG Flaring Project	Netherlands	ACM0001 ver. 8
05 Juli 2009	Gikoko Palembang – LFG FlaringProject	Sweden	ACM0001 ver. 8
26 Juli2009	Gikoko-Bekasi-LFG Flaring Project	Netherlands	ACM0001 ver. 8
30 Mei2008	Pontianak – GHG emission reduction through improved MSW management – LFG Capture, Flaring and Electricity Generation	Netherlands	ACM0001 ver. 5

*Sumber : PT.Gikoko Kogyo Indonesia 2017*

**IV.3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa**

TPA Tamangapa berlokasi di wilayah Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, jaraknya 15 km dari pusat Kota Makassar. TPA Tamangapa saat ini memiliki luas 16,8 ha dan hanya 80% dari kapasitas keseluruhan TPA yang di gunakan. TPA Tamangapa didirikan pada tahun 1993 dan kemudian dijadikan sebagai satu-satunya TPA yang ada di Kota Makassar.

Berdasarkan konturnya lahan TPA di Makassar telah di bangun dibagian lembah yang miring. Kemiringan lembah tersebut kira-kira setinggi 15 m. Lahan basah yang luas terbentang pada kaki kemiringan lembah ini, yang saat ini juga merupakan bagian dari lahan TPA. Tidak ada perumahan atau properti lainnya yang dibangun di sekitar kaki lembah ini, namun terjadinya longsor dapat beresiko kepada ekosistem yang berdampingan dengan lahan basah tersebut, juga berdampak

kepada pengelola TPA dan bahkan komunitas pemulung yang ada di lokasi TPA saat ini.

Sampah perkotaan yang dikelola TPA sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah perkantoran, dan sampah pusat perbelanjaan. Secara administratif, TPA ini berada di wilayah Tamangapa Kecamatan Manggala. Lahan TPA berlokasi sangat dekat dengan daerah perumahan rumah sehingga sering timbul keluhan dari penduduk setempat terkait bau tak sedap yang berasal dari TPA, terutama pada saat musim hujan. Sebagian besar penduduk setempat mengeluh soal bau tak sedap. Terdapat beberapa pusat aktivitas dan perumahan seperti tempat ibadah dan sekolah, dan perkantoran yang berlokasi di sekitar 1 km dari lokasi proyek. Semenjak tahun 2000, berbagai perumahan telah didirikan, seperti Perumahan Antang, Perumahan TNI Angkatan Laut, Perumahan Graha Jannah, Perumahan Griya Tamangapa, dan Perumahan Taman Asri Indah yang berlokasi berdekatan dengan TPA Tamangapa.

Terdapat dua buah rawa yang berdekatan dengan perumahan tersebut, yaitu Rawa Borong yang berlokasi di sebelah utara dan Rawa Mangara yang bertempat di sebelah timur. Air dari Rawa Mangara mengalir menuju sungai Tallo dan air dari Rawa Borong mengalir menuju saluran air Borong. Sebelum Tamangapa dibangun sebagai lahan TPA, pada tahun 1979, sampah padat perkotaan di buang di Panampu, Kecamatan Ujung Tanah. Mengingat keterbatasan wilayah dan lokasinya yang dekat dengan laut, tempat pembuangan sampah itu dipindahkan ke Kantinsang, Kecamatan Biringkanaya pada tahun 1980, karena telah menurunkan kualitas air.

Pada tahun 1984, pemerintah lokal membangun TPA baru di Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pendirian wilayah perumahan di sekitar Kecamatan Tamalate mendorong pemerintah lokal untuk membangun Tamangapa sebagai lahan TPA untuk Kota Makassar pada tahun 1992.

TPA Tamangapa merupakan tempat pembuangan sampah utama bagi penduduk Kota Makassar. Dengan memperhitungkan peningkatan volume sampah di masa depan, pemerintah Kota Makassar berencana untuk memperluas lahan TPA. Kota Makassar telah mengalokasikan dana sekitar US\$ 60,000 pada tahun 2007 guna mendapatkan 3-4 ha area tambahan untuk TPA. Kemudian pada tahun 2017 TPA Tamangapa luasnya sudah mencapai 16,8 ha.. Berikut adalah informasi terperinci TPA Tamangapa



**Tabel IV.2**

**Informasi Terperinci TPA Tamangapa Kota Makassar**

<b>Deskripsi</b>	<b>Lahan/Kondisi/Status</b>
Nama Lahan	TPA Tamangapa
Lokasi	Kelurahan Tamangapa
Luas Wilayah	16,8 Ha
Proses	TPA berdasarkan kebutuhan
Jarak ke Perumahan	200 m
Jarak ke Sungai	3 km
Jarak ke Pantai	14 km
Jarak ke Lapangan Udara	30 km
Jarak ke Pusat Kota	15 km
Topografi	Sebagian besar horizontal
Metode Pengelolaan TPA	Controll landfill dan open dumping
Kapasitas	3.642 M3/hari
Penggunaan	80% dari luas lahan
Lapisan Impermeable	Padatan tanah liat
Pemulung	500 orang
Pengumpul	10 orang

*Sumber : Kantor UPTD TPA Tamangapa 2017*

Setelah informasi terperinci TPA Tamangapa diatas, TPA Tamangapa juga memiliki sarana dan prasarana seperti bulldoser, excavator, jembatan timbang, garasi alat berat, pencucian alat berat, kolam lecheate, instalasi lecheate, yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3**

**Sarana dan Prasarana TPA Tamangapa**

<b>SARANA</b>	<b>KONDISI</b>	<b>PRASARANA</b>	<b>KONDISI</b>
Buldozer D68 (2008) 1 Unit	Rusak	Bangunan Bengkel (1 Unit)	Baik
Buldozer D65 (1997) 2 Unit	Rusak	Jembatan Timbang (1 Unit)	Baik
Buldozer D31 (1986) 1 Unit	Rusak	Kantor Pengelola TPA (1 Unit)	Baik
Buldozer WDA D5R (2015) 1 Unit	Baik	Garasi Alat Berat (1 Unit)	Baik
Excavator PC200 (2002) 1 Unit	Baik	Pencucian Alat Berat (1 Unit)	Baik
Excavator PC200 (2008) 1 Unit	Baik	Kolam Lecheate (1 Unit)	Baik
Beckhoe Loader (1995) 4 Unit	2 Unit Baik 2 Unit Rusak	Instalasi Lecheate (1 Unit)	Baik
Wheel Loader W70 (1984) 2 Unit	1 Unit Baik 1 Unit Rusak		
Wheel Excavator (2006) 1 Unit	Baik		

*Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan 2017*

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar yang berdasarkan tujuan penelitian yaitu apakah telah sesuai dengan MOU yang telah di sepakati. Hasil penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian, menggambarkan seperti apa hasil pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kemitraan pemerintah dan swasta.

#### **V.1. Mekanisme**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kontrak dan kesepakatan dan mekanisme bantuan dana yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang akan diklasifikasikan sebagai berikut :

##### **V.1.1. Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Bidang Kontrak dan Kesepakatan**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di bidang kontrak dan kesepakatan. Pemerintah Kota Makassar melakukan kerjasama dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement No. MOA/05/XII.17/GKI/2007 tentang kerjasama investasi proyek Clean

Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas (LFG) di TPA Tamangapa Kota Makassar. Kerja sama ini berlangsung selama 10 tahun dengan model Build-Operate-Transfer (BOT) yakni pihak PT. Gikoko Kogyo Indonesia membangun sistem pengumpulan dan pembakaran LFG di TPA, mengoperasikan sistem tersebut dan setelah masa kerjasama berakhir maka diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar berupa bangunan, peralatan, dan penataan kembali TPA Tamangapa sebagai sanitary landfill, beserta pembangunan dan pengoperasian pemusnahan gas metan.

Selanjutnya secara singkat pembangunan dan pengelolaan proyek CDM ini memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah kota berada pada dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.
- b. Pemerintah Kota memiliki aset berupa tanah atau fasilitas kewenangan untuk membangun dan mengelola infrastruktur.
- c. Pemerintah Kota menyediakan lahan yang memadai dan memberikan jaminan kelayakan sarana prasarana TPA.
- d. PT. Gikoko Kogyo Indonesia mengambil alih proyek CDM termasuk dalam hal pendanaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek LFG.
- e. PT. Gikoko Kogyo Indonesia bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang berhubungan dengan LFG termasuk pengoperasian dan pemeliharaan LFG.

- f. Pemerintah Kota berhak menerima kontribusi 10% dari penjualan CER untuk digunakan dalam investasi manajemen persampahan kota.
- g. PT. Gikoko Kogyo Indonesia menyediakan 7% dari penjualan CER untuk mendanai program pengembangan masyarakat termasuk didalamnya industri yang berhubungan daur ulang sampah, fasilitas umum, dan sosial masyarakat sekitar TPA.

Pemerintah Kota Makassar melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan sampah dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia. Untuk menjelaskan data diatas maka peneliti melakukan wawancara dengan GS selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :

“Kami melakukan kerja sama dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan sampah di Kota Makassar khususnya di TPA Tamangapa. Kerjasama ini berjalan selama 10 tahun dengan metode proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG).”

Dan hal yang sama diungkapkan oleh SN selaku Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar :

“Perusahaan kami telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar yakni khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement No. MOA/05/XII.17/GKI/2007 tentang kerjasama investasi proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas (LFG) di TPA Tamangapa Kota Makassar.”

Dari data dan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan Pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah bekerjasama dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan sampah di Kota Makassar khususnya di TPA Tamangapa yang ditandai

dengan penandatanganan Memorandum of Agreement No. MOA/05/XII.17/GKI/2007, dan juga kerja sama ini berjalan selama 10 tahun dengan metode proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG). Dalam kerjasama tersebut diharapkan dapat menangani masalah lingkungan di sekitar TPA Tamangapa maupun Kota Makassar.

#### **V.1.2. Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di bidang Bantuan Dana**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan sampah di bidang bantuan dana. Dalam pengelolaan sampah ini pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bekerja sama dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan terutama sampah yang ada di TPA Tamangapa Kota Makassar.

Pada kemitraan bidang bantuan dana Pemerintah Kota Makassar menerima pembagian hasil berupa royalti melalui pembakaran LFG yang menghasilkan data-data yang dapat dijual menjadi CER (Certificate Emission Reduction), CER tersebut dibeli oleh sejumlah negara maju, khusus di Makassar sendiri CER yang dihasilkan sampah ini dibeli oleh pihak Belanda melalui Bank Dunia yang oleh Pemerintah Kota Makassar dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota sendiri menerima kontribusi sebesar 10% dari hasil penjualan CER tersebut, dan juga PT. Gikoko Kogyo menyediakan 7% dari penjualan CER untuk mendanai program pengembangan masyarakat termasuk didalamnya industri yang berhubungan daur

ulang sampah, fasilitas umum, dan sosial masyarakat sekitar TPA. Untuk menjelaskan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan GS selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :

“Keuntungan dari PT. Gikoko Kogyo Indonesia yaitu sebesar 10% yang didapat dari hasil penjualan CER di pihak negara maju, dan hasil dari CER ini kami gunakan untuk investasi manajemen persampahan kota, dan perusahaan ini menyediakan 7% dari penjualan CER untuk fasilitas maupun sosial masyarakat di TPA Tamangapa Kota Makassar.”

RM selaku Kepala UPTD Tamangapa juga mengungkapkan :

“PT. Gikoko Kogyo Indonesia membantu berupa perbaikan fasilitas sarana-prasarana yang ada di TPA Tamangapa agar fasilitas tersebut dapat membantu proses pembersihan sampah di sekitar TPA maupun Kota Makassar.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mendapatkan 10% dari hasil penjualan CER untuk investasi manajemen persampahan kota dan 7% untuk fasilitas umum, hal yang berhubungan dengan daur ulang sampah, dan juga sosial masyarakat yang ada di TPA Tamangapa Kota Makassar.

## **V.2. Struktur**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana peran dan tugas pemerintah dan swasta dalam proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas (LFG) serta bagaimana berjalannya aktifitas proyek yang dilakukan oleh PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut :

### **V.2.1. Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan sampah melalui proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas (LFG)**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG), yang akan diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **1. Sampah di Kota Makassar**

Banyaknya sampah di perkotaan khususnya di Kota Makassar membuat Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar melakukan berbagai cara untuk mengatasi sampah tersebut salah satunya yaitu dengan menjalankan kerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Gikoko Kogyo Indonesia. Kota Makassar sampahnya itu terbagi menjadi dua macam yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik, sampah organik merupakan limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang mengalami pemlapukan atau pembusukan. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan karena dapat diurai oleh bakteri dengan alami dan berlangsung dengan cepat. Beberapa contoh dari sampah organik adalah kayu, daun, kulit telur, bangkai tumbuhan, bangkai hewan, kotoran manusia dan hewan, sisa manusia, sisa makanan, dan lain-lain yang berasal dari alam. Sampah anorganik adalah yang berasal dari manusia yang sulit diurai oleh bakteri sehingga memerlukan waktu yang lama bahkan hingga ratusan tahun untuk dapat menguraikannya. Sampah anorganik biasanya berasal dari limbah perindustrian.



Beberapa contoh dari sampah anorganik yaitu botol minuman mineral, besi, kaca atau beling, plastik, kain atau baju, ban bekas, pulpen, kaleng, jam tangan dan lain-lain yang berasal dari limbah industri. Adapun komposisi sampah di Kota Makassar keadaan bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel V.1**  
**Komposisi Sampah di Kota Makassar Keadaan Bulan Desember 2015**

<b>No.</b>	<b>Komposisi Sampah</b>	<b>Volume (M3)</b>	<b>Presentase</b>
1	Sampah Organik	3.165,73	70,43%
2	Kertas, Karton	537,14	11,95%
3	Plastik	425,66	9,47%
4	Metal, Kaleng, Besi, Aluminium	162,71	3,62%
5	Karet, Ban	126,76	2,82%
6	Kaca	43,15	0,96%
7	Kayu	31,01	0,69%
8	Lain-lain	2,70	0,06%
	Jumlah	4.494,86	100,00%

*Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan 2015*

Dari tabel komposisi sampah di Kota Makassar periode bulan desember 2015 diatas terlihat bahwa sampah organik yang paling banyak terdapat di Kota Makassar daripada sampah lainnya. Hal ini diungkapkan oleh IS selaku Kepala Bidang Persampahan, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :

“Sampah di Kota Makassar yang paling banyak adalah sampah organik yang diantaranya yaitu sampah rumah tangga, bangkai tumbuhan, sisa makanan, dan lain-lainnya.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh KA selaku Kepala Bagian Tata Usaha UPTD TPA Tamangapa :

“Sampah yang masuk di TPA Tamangapa terbagi menjadi macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, yang paling banyak dibawa oleh truk

sampah maupun motor fukuda yaitu sampah organik yang terdiri dari sampah sisa makanan, bangkai hewan, sampah rumah tangga, dan sebagainya.”

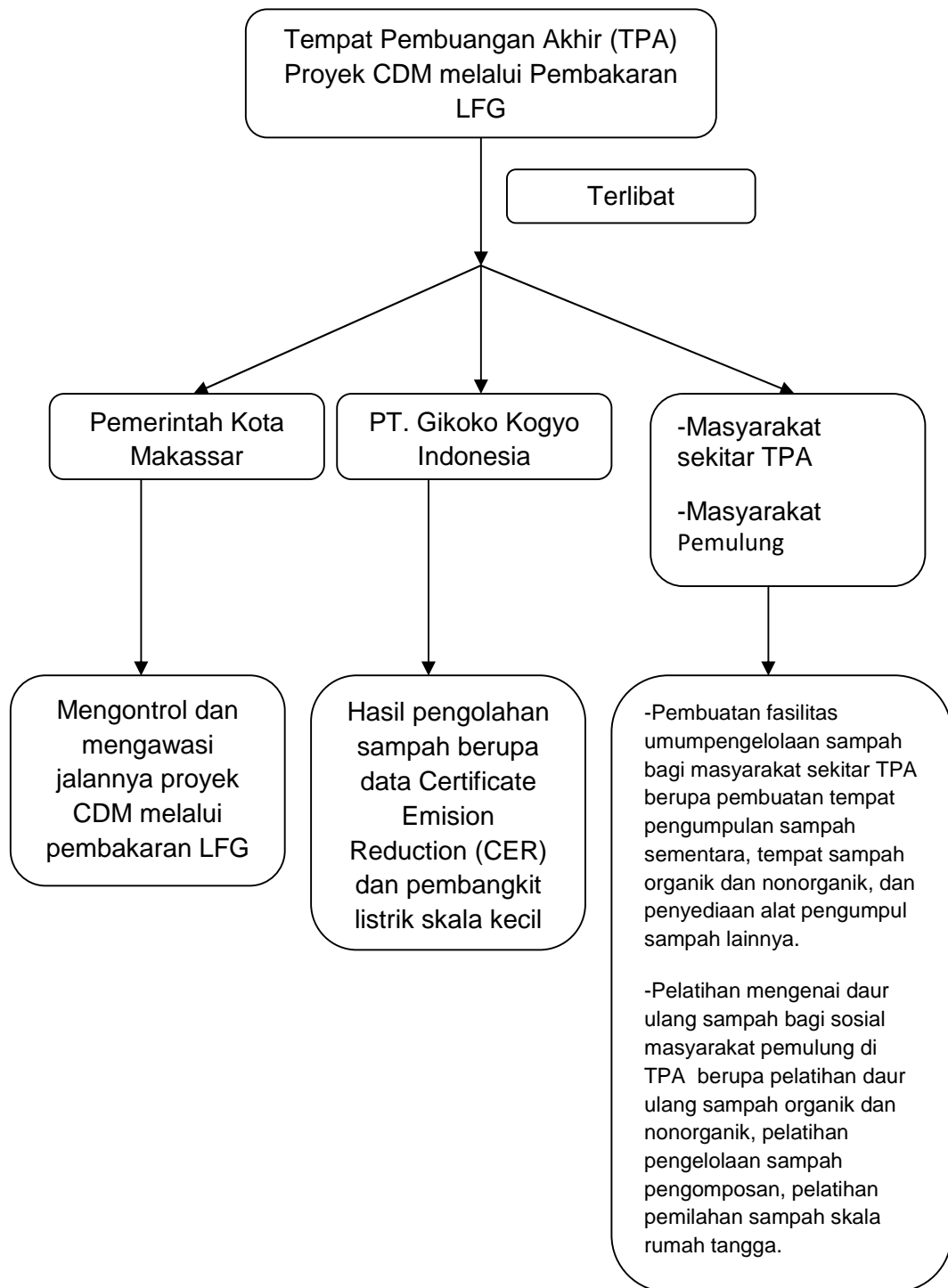
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sampah di Kota Makassar terbagi menjadi dua macam yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah yang paling banyak di Kota Makassar yaitu sampah organik yang berjumlah 3.165,73  $m^3$ , yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sisa makanan, sampah bangkai tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya sampah anorganik yaitu sisa dari perindustrian seperti plastik, metal, besi, kaleng berjumlah sedikit dibandingkan dengan sampah organik.

## **2. Kemitraan Pengelolaan Sampah dalam Proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui Pembakaran Landfill Gas (LFG)**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang kemitraan pengelolaan sampah dalam proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG) pada saat masih berjalan tahun 2011-2015, hasil pengolahan sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar dan proses proyek yang tidak berjalan lagi dengan melihat kondisi TPA pada saat sekarang, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### **A. Kemitraan Pengelolaan Sampah dalam Proyek CDM melalui Pembakaran LFG Tahun 2011-2015**

Pada poin ini peneliti menjelaskan tentang kemitraan pengelolaan sampah dalam proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG) yang akan dijelaskan pada gambar pengolahan sampah berikut ini :



**Gambar V.1 Pengolahan Sampah di TPA Tamangapa**

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukkan bahwa di TPA Tamangapa Kota Makassar pengelolaan sampah dalam proyek CDM melalui pembakaran Landfill Gas yang terlibat Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan, pihak swasta yakni PT. Gikoko Kogyo Indonesia, dan yang terakhir masyarakat sekitar TPA Tamangapa dan masyarakat pemulung. Peranan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yaitu mengontrol dan mengawasi jalannya proyek CDM melalui pembakaran LFG dan bertanggung jawab mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar. Selanjutnya, perusahaan swasta PT. Gikoko Kogyo Indonesia melakukan pengelolaan sampah dan bertugas mengambil alih proyek CDM mulai dari pendanaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek LFG, hasil dari proyek ini berupa data CER dan pembangkit listrik skala kecil, sementara masyarakat sekitar TPA Tamangapa dan masyarakat pemulung turut merasakan begitu baiknya kemitraan ini karena adanya pembuatan fasilitas umum berupa pembuatan tempat sampah sementara dan mengikuti pelatihan daur ulang sampah yang diadakan PT. Gikoko Kogyo. Untuk menjelaskan data ini peneliti melakukan wawancara dengan IS selaku Kepala Bidang Persampahan, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :

“Pada proyek CDM melalui Pembakaran LFG ini kami bertugas mengontrol dan mengawasi jalannya proyek yang dilaksanakan oleh pihak swasta agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

SN selaku Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar juga mengemukakan bahwa :

“Kami mengambil alih proyek ini mulai dari pendanaan, pembangunan, dan pengoperasian pembakaran LFG. Hasil dari proyek ini berupa data CER yang dapat dijual dan pembangkit listrik skala kecil untuk para pemulung jika ingin bekerja pada malam hari.”

Sementara untuk masyarakat sekitar TPA Tamangapa peneliti melakukan wawancara dengan DT penduduk yang tinggal dekat dengan TPA Tamangapa :

“Kerjasama ini sangat bagus sekali dan saya sangat setuju, karena sampah disekitar TPA mulai berkurang dan banyaknya bentuk pelatihan dan pembuatan tempat sampah menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.”

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa proyek CDM melalui pembakaran LFG yang terlibat yaitu Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang memiliki peranan bertugas mengontrol dan mengawasi jalannya proyek CDM, PT. Gikoko Kogyo yang mengambil alih proyek dan hasil pengolahannya yaitu berupa data CER dan pembangkit listrik skala kecil sementara masyarakat yang merasakan dampak positif terkait adanya kemitraan ini.

Selanjutnya, pengelolaan sampah oleh pihak swasta memiliki beberapa tahapan agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan data perbandingan pengolahan sampah yang dilakukan oleh PT. Gikoko Kogyo yang akan dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Penutupan Sel Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Penutupan sel TPA merupakan tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam menutup sel TPA. Di TPA Tamangapa ada banyak sel yang digunakan untuk menampung sampah, sementara PT. Gikoko Kogyo mendesain penataan sel-sel yang ada di TPA. Penutupan sel dilakukan ketika ketinggian sampah dianggap cukup sehingga perlu penutupan dengan menggunakan tanah. Sel merupakan lapisan sampah yang dipadatkan yang dibatasi tanah yang terletak pada area pegunungan. Di TPA Tamangapa ada 6 sel yang tersedia diantaranya sebagai berikut :

**Tabel V.2**  
**Informasi Luas dan Kapasitas Blok TPA Tamangapa**

Blok	Luas (M2)	Kapasitas (M2)		Ketinggian (m)
		Luas terpakai (M2)	Sisa (M2)	
A	1779	1779	-	2 m
B	2242	2042	200	12-13 m
C	1614	1614	-	7-10 m
D	2665	1965	700	10-15 m
E	4030	450	3580	7 m
F	950	-	950	7 m
Fasilitas Pendukung (kantor, jalan, bengkel)	1000			

*Sumber : Kantor UPTD TPA Tamangapa, 2017*

Tabel diatas menunjukkan bahwa luas dan ketinggian tiap sel TPA berbeda-beda. Sel-sel yang tumpukan sampahnya telah ditinggikan dan dilakukan penutupan dengan tanah, setelah itu sel-sel tersebut dapat dikatakan sebagai

zona tidak aktif artinya pembuangan sampah sudah tidak dapat dilakukan di sel tersebut. Zona-zona aktif seperti sel A, B, dan F menjadi tempat pembuangan sampah-sampah padat perkotaan. Kemudian zona tidak aktif seperti C, D, dan E menjadi zona yang dipasangkan pipa secara vertikal dan horizontal dengan cara mengebor pada tiap sel tersebut.

## 2. Pengumpulan Landfill Gas (LFG)

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang disepakati Pemerintah Kota dengan PT. Gikoko Kogyo, pengumpulan gas di TPA Tamangapa sepenuhnya dilakukan oleh PT. Gikoko Kogyo mulai dari pendanaan terkait proyek LFG dan pelaksanaan operasional dan pembakaran gas. Pada proses pengumpulan Landfill Gas PT. Gikoko Kogyo memasang jaringan pipa kemudian membangun mesin pengumpul dan pembakaran gas. Pengumpulan gas TPA mulai dilakukan dengan melakukan pengeboran 33 sumur untuk memperoleh gas. Secara efektif lokasi perusahaan berada ditengah TPA agar pengumpulan gas LFG dapat efektif dan mencakup seluruh area TPA.

## 3. Pemusnahan/Pembakaran Landfill Gas

Setelah melakukan pengumpulan gas maka selanjutnya PT. Gikoko Kogyo melakukan proses pemusnahan/pembakaran LFG yang merupakan elemen penting dalam mengurangi emisi gas metan lewat pembakaran gas LFG. Dalam hal ini PT. Gikoko Kogyo memiliki teknologi yang mampu melakukan pembakaran gas metan sehingga kadar karbonnya menjadi zero. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan

uap air (H<sub>2</sub>O) merupakan emisi utama pembakaran yang telah dilakukan. CO<sub>2</sub>e menjadi standar dalam pengukuran pemusnahan/pembakaran gas ini.

Untuk menjelaskan data diatas peneliti melakukan wawancara dengan SN selaku Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar :

“Proyek Clean Development Mechanism melalui pembakaran Landfill Gas memiliki beberapa tahapan yaitu : 1. Penutupan Sel TPA, 2. Pengumpulan Landfill Gas, dan yang terakhir yaitu 3. Pembakaran/pemusnahan Landfill Gas.”

HS selaku Koordinator Alat Berat UPTD TPA Tamangapa juga mengungkapkan hal yang sama :

“Pengelolaan sampah oleh pihak swasta memiliki beberapa tahapan yang dapat membantu proses pemusnahan sampah yang ada di TPA, sehingga sampah tersebut pun menjadi berkurang dari sebelumnya.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG) memiliki beberapa tahapan yaitu melakukan penutupan sel TPA, penutupan sel TPA ini dilakukan pada zona aktif di wilayah persampahan pada TPA yang ditutup dengan tanah oleh buldozer dan setelah ditutupi tanah menjadi zona tidak aktif, setelah melakukan penutupan sel TPA tahapan berikutnya adalah pengumpulan Landfill Gas dengan cara mengebor dan memasang pipa secara vertikal dan horizontal pada zona tidak aktif, setelah mengebor dan memasang pipa selanjutnya PT. Gikoko Kogyo menghidupkan mesin pengumpul gas, dan tahapan terakhir adalah pembakaran Landfill Gas yang merupakan element paling penting dari kerjasama ini. PT. Gikoko Kogyo memiliki teknologi yang mampu melakukan pembakaran gas metan sehingga sampah pada zona tidak aktif menjadi berkurang dan volume



sampah pun menjadi turun secara drastis. Adapun daftar perbandingan pengolahan sampah yang dilakukan oleh PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar dalam (M3 perhari) dalam kurun waktu 5 tahun dari 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel V.3**

**Tabel Perbandingan Pengolahan Sampah Kota Makassar oleh PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam (M3 perhari) dalam Kurun Waktu 5 Tahun dari Tahun 2011-2015**

No.	Tahun Penanganan	Timbulan Sampah	Pengolahan	%Terhadap Timbulan
1	2011	3.781,23 M3/hari	3.373,42 M3/hari	89,21%
2	2012	3.923,52 M3/hari	3.520,07 M3/hari	89,72%
3	2013	4.057,28 M3/hari	3.642,56 M3/hari	89,78%
4	2014	4.188,26 M3/hari	3.776,23 M3/hari	90,16%
5	2015	4.494,83 M3/hari	4.063,10 M3/hari	90,39%

*Sumber : PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar 2015*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011-2015 volume sampah menjadi semakin banyak, sehingga PT. Gikoko Kogyo harus melaksanakan proyek tersebut dengan cepat agar volume atau timbulan sampah menjadi berkurang yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya, setelah melakukan proses pembakaran Landfill Gas terlihat pada tabel diatas bahwa dari tahun 2011 hingga 2015 volume sampah menjadi berkurang. Untuk menjelaskan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan SN selaku Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar :

“Setelah dilakukannya proses pembakaran LFG volume sampah menjadi berkurang sehingga dengan berkurangnya sampah pada TPA maka sampah di Kota Makassar timbulannya tidak banyak lagi seperti sebelumnya.”

KA selaku Kepala Bagian Tata Usaha UPTD Tamangapa juga mengemukakan hal yang sama :

“Pengolahan sampah yang dilakukan oleh PT. Gikoko Kogyo sangat berdampak positif yang terjadi pada TPA Tamangapa timbulan sampah menjadi berkurang ketika proses pembakaran dilakukan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebelum proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh PT. Gikoko Kogyo timbulan sampah pada TPA Tamangapa Kota Makassar menjadi sangat banyak sekali dan setelah dilakukan proses pembakaran dari tahun 2011-2015 timbulan sampah menjadi berkurang dan sangat berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan di sekitar TPA Tamangapa.

## **B. Hasil Pengolahan sampah oleh PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang hasil pengolahan sampah oleh PT. Gikoko Kogyo Indonesia melalui proyek yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Hasil pengolahan sampah oleh PT. Gikoko Kogyo Indonesia yaitu berupa data CER (Certificate Emission Reduction) dan pembangkit listrik skala kecil. Hasil pengolahan tersebut peneliti klasifikasikan sebagai berikut :

### **1. Data Certificate Emission Reduction (CER)**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian V.2 pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di bidang bantuan dana, hasil dari pengolahan sampah atau pembakaran Landfill Gas berupa data CER. Pemerintah Kota Makassar berhak menerima kontribusi 10% dari penjualan CER untuk investasi manajemen persampahan kota, dan 7% dari penjualan CER

tersebut juga PT. Gikoko Kogyo mendanai program pengembangan masyarakat termasuk didalamnya industri yang berhubungan daur ulang sampah, fasilitas umum, dan sosial masyarakat sekitar TPA. Pembakaran Landfill Gas ini berbentuk CO<sub>2</sub>e yang akan menjadi standar dalam pengukuran pemusnahan gas ini. Secara potensial gas yang dapat dimusnahkan dapat kita lihat pada tabel estimasi berikut ini :

**Tabel V.4**

**Tabel Estimasi Proyek Reduksi Emisi TPA Tamangapa**

<b>No.</b>	<b>Proyek Years</b>	<b>Potential Emission Reduction (tone CO<sub>2</sub>e/year)</b>
1	2011	109.659
2	2012	118.598
3	2013	127.395
4	2014	136.195
5	2015	145.090
	Total Estimated Reduction (tones of CO <sub>2</sub> e)	636.937
	Total Number of Crediting Years	5
	Annual Average Over the Crediting Period of Estimated Reductions (tones of CO <sub>2</sub> e)	127.387,4

*Sumber : PT. Gikoko Kogyo Indonesia 2015*

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa setiap 5 tahun terakhir pembakaran Landfill Gas selalu bertambah sehingga volume sampah ikut menurun, dan dari tabel diatas juga setiap tahun dilakukan penjualan CER yang dapat menguntungkan pihak Pemerintah Kota Makassar dan perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia. Data CER ini juga dibeli oleh sejumlah negara maju, khusus di Makassar CER yang dihasilkan dibeli oleh pihak Belanda melalui Bank Dunia.

## **2. Pembangkit Listrik Skala Kecil**

Selain melakukan pembakaran Landfill Gas PT. Gikoko Kogyo juga membuat pembangkit listrik skala kecil yang dapat menerangi area TPA dan hanya terbatas pada penggunaan TPA sendiri. Pembangkit listrik ini berasal dari tenaga gas yang dihasilkan oleh pabrik yang didirikan oleh PT. Gikoko Kogyo, titik lampu di TPA ada sebanyak 30 titik untuk menerangi pada malam hari dengan kekuatan 120.000 watt yang sangat berguna bagi masyarakat pemulung yang ingin beraktifitas pada malam hari. Untuk menjelaskan data tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan SN selaku Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar :

“Selain dari proses pembakaran Landfill Gas kami juga membuat pembangkit listrik skala kecil dari tenaga gas yang ada pada timbunan sampah pada sel TPA Tamangapa dengan kekuatan 120.000 watt, sehingga sangat berguna bagi masyarakat pemulung yang ingin beraktifitas pada malam hari”.

KA selaku Kepala Bagian Tata Usaha UPTD TPA Tamangapa juga mengemukakan :

“Di TPA ini ada sebanyak 30 titik lampu yang dipersiapkan dan digunakan oleh PT Gikoko Kogyo dalam memfasilitasi listrik di area sekitar TPA Tamangapa, yang memberikan tiang dan lampu adalah Pemerintah Kota bukan dari PT. Gikoko Kogyo, jadi perusahaan PT. Gikoko Tinggal menyalakannya saja.”

Dari data dan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan hasil pengelolaan sampah di TPA Tamangapa selain berupa data CER, ada juga pembangkit listrik skala kecil yang didirikan oleh PT. Gikoko Kogyo yang berkekuatan 120.000 watt dan sebanyak 30 titik lampu yang ada di TPA dan sangat berguna bagi masyarakat pemulung jika ingin melakukan aktifitas pada malam hari.

### **C. Vakumnya Perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dan Kondisi TPA Pada Saat Sekarang**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam proses pengerjaan pembakaran LFG, upaya pemerintah dalam mengatasi sampah di Kota Makassar, dan kondisi TPA setelah vakumnya perusahaan ini pada saat sekarang yang dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Vakumnya PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam Proses Pembakaran Landfill Gas (LFG)**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia di TPA Tamangapa Kota Makassar. Seiring berjalannya waktu PT. Gikoko Kogyo mengalami pemvakuman dalam pembakaran Landfill Gas dikarenakan perjanjian ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) yang disetujui PT. Gikoko Kogyo dengan pihak Bank Dunia telah berakhir di tahun 2015 kemudian pembayaran hasil data CER yang berasal dari hitungan jumlah gas metan yang telah dimusnahkan di TPA Tamangapa belum dapat dilakukan pembayaran oleh pihak Bank Dunia. Alasan inilah yang membuat PT. Gikoko Kogyo tidak dapat beroperasi atau mengalami pemvakuman karena masih menunggu penerbitan dan pembayaran CER. Untuk menjelaskan data ini peneliti melakukan wawancara dengan SN selaku Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar mengungkapkan :

“Untuk saat ini perusahaan menghentikan atau vakum dalam proses pembakaran Landfill Gas dikarenakan pembayaran hasil data CER yang

berasal dari hitungan jumlah gas metan yang telah dimusnahkan di TPA Tamangapa belum dapat dilakukan pembayaran oleh pihak Bank Dunia.”

RM selaku Kepala UPTD TPA Tamangapa juga mengungkapkan hal yang sama :

“Perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia sedang mengalami pemvakuman dikarenakan adanya masalah internal pada perusahaan tersebut sehingga proses pengelolaan sampah melalui pembakaran Landfill Gas (LFG) menjadi terhenti untuk sementara.”

Dari data dan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan Pembakaran Landfill Gas oleh PT. Gikoko Kogyo mendapatkan masalah dari proses pemusnahan tumpukan sampah ini, masalahnya yaitu perjanjian ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) yang disetujui PT. Gikoko Kogyo dengan pihak Bank Dunia telah berakhir di tahun 2015 kemudian pembayaran hasil data CER yang berasal dari hitungan jumlah gas metan yang telah dimusnahkan di TPA Tamangapa belum dapat dilakukan pembayaran oleh pihak Bank Dunia alasan inilah yang membuat perusahaan PT. Gikoko Kogyo mengalami pemvakuman proses pengerjaan pembakaran Landfill Gas untuk sementara waktu.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Sampah di Kota Makassar**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang upaya pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi sampah setelah vakumnya perusahaan swasta yakni PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang diklasifikasikan sebagai berikut :

### **A. Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) di TPA Tamangapa**

Setelah vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia di TPA Tamangapa, Pemerintah Kota Makassar yakni pihak Dinas Pertamanan dan

Kebersihan tidak tinggal diam dalam mengurangi volume sampah yang ada di Kota Makassar dan dalam menangani masalah lingkungan, mereka membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk pengelolaan sampah yang ada di TPA Tamangapa. Adapun beberapa SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut yaitu :

#### 1. Sistem Pencatatan Sampah di Pos Penimbangan Sampah TPA Tamangapa

- a. Sebelum memasuki TPA, truk sampah dan motor fukuda berhenti di pos penimbangan sampah untuk di input berat volume sampahnya, nama sopirnya, dari kecamatan mana dan nomor polisi plat mobil maupun motornya. ( $\pm 1$  menit).
- b. Selanjutnya truk sampah dan motor fukuda menuju zona aktif TPA untuk membuang atau membongkar sampah ( $\pm 5$  menit).
- c. Setelah membongkar muatan sampah, truk sampah dan motor fukuda kembali ke pos penimbangan sampah ( $\pm 4$  menit) dan truk sampah maupun motor fukuda yang dalam kondisi kosong muatannya di timbang lagi ( $\pm 1$  menit).

#### 2. Pembuangan Sampah di TPA Tamangapa

- a. Setelah truk sampah dan motor fukuda membongkar atau membuang sampah di zona aktif selanjutnya sampahnya di ratakan oleh alat berat (Excavator, Dozer, Loader)
- b. Setelah gundukan-gundukan sampahnya rata kemudian ditutupi tanah (cover soil) dan cover soil dilakukan setelah ketinggian sampah mencapai enam meter.

### 3. Air Lindi di TPA Tamangapa

- a. Air yang ada di zona aktif TPA mengalir ke kolam air lindi pertama.
- b. Air yang ada di kolam lindi pertama yang dilapisi membran (untuk penyaringan air) selanjutnya dialirkan ke kolam lindi kedua dengan menggunakan kincir air yang berfungsi menghilangkan atau mengurangi kandungan organik dan unsur logam yang ada pada air lindi.
- c. Begitu selanjutnya dari kolam lindi kedua terus dialirkan ke kolam lindi berikutnya 3,4 sampai dengan 5 dengan menggunakan kincir air yang berfungsi menghilangkan atau mengurangi kandungan organik dan unsur logam yang ada pada air lindi.
- d. Dan pada kolam lindi ke-enam atau kolam lindi yang terakhir air yang dihasilkan sudah bersih atau sudah layak untuk dialirkan ke saluran drainase.

Untuk menjelaskan data diatas maka peneliti melakukan wawancara dengan IS selaku Kepala Bidang Persampahan, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :

“Dengan timbulnya kembali volume sampah yang menumpuk di Kota Makassar maka kami membuat SOP untuk TPA Tamangapa, adapun beberapa SOP tersebut yaitu : sistem pencatatan sampah, pembuangan sampah, air lindi.”

KA selaku Kepala Bagian Tata Usaha UPTD TPA Tamangapa juga mengungkapkan hal yang sama :

“Setelah vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia, maka Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan



membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengurangi volume sampah yang ada di TPA Tamangapa yang semakin hari semakin menumpuk.”

Dari data dan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia membuat Pemerintah Kota Makassar yakni Dinas Pertamanan dan Kebersihan memikirkan cara agar sampah yang ada di TPA menjadi tidak menumpuk yang dapat menimbulkan masalah lingkungan. Adapun cara tersebut yaitu dengan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) di TPA Tamangapa Kota Makassar melalui sistem pencatatan sampah, pembuangan sampah, cara mengatasi air lindi.

## **B. Bank Sampah**

Pemerintah Kota Makassar yakni Dinas Pertamanan dan Kebersihan membentuk bank sampah yang ditempatkan di tiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Bank sampah di Kota Makassar berjumlah 208 lokasi. Fungsi dari bank sampah ini yaitu agar mengurangi sampah yang masuk pada TPA sehingga volume sampah yang ada di TPA menjadi berkurang, beberapa contoh sampah yang masuk di bank sampah yaitu kebanyakan sampah anorganik seperti kertas, plastik, besi, kaleng, aluminium, dan sebagainya serta dengan adanya bank sampah ini dapat meningkatkan taraf hidup para pemulung yang ada di TPA Tamangapa dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar TPA Tamangapa. Untuk menjelaskan data tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan IS selaku KepalaBidang Persampahan, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :

“Dengan adanya Bank Sampah ini maka sampah yang ada di Kota Makassar diharapkan dapat berkurang dan juga dapat membuat sampah yang masuk di TPA menjadi tidak terlalu banyak dan tidak menimbulkan masalah lingkungan di sekitar wilayah TPA, dan Bank Sampah ini juga diharapkan dapat membantu warga miskin atau pemulung sampah agar hasil sampahnya bisa ditabung dan dapat diuangkan kembali.”

AR selaku staf pegawai Seksi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan

Manggala Kota Makassar mengungkapkan hal yang sama :

“Bank sampah ini berfungsi untuk mengurangi sampah yang masuk di TPA, cara menguranginya yaitu dengan memilah sampah anorganik yang dapat dijual kembali dan menjadi pendapatan para pemulung yang ada disekitar wilayah TPA maupun di Kecamatan itu sendiri.”

Dari data dan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar membentuk bank sampah yang ditempatkan di tiap kecamatan yang ada di Kota Makassar berjumlah 208 lokasi, bank sampah ini umumnya kebanyakan sampah anorganik yang terdiri dari sampah kertas, plastik, bekas limbah perindustrian dan sebagainya. Dengan dibentuknya bank sampah ini diharapkan dapat membantu warga miskin yakni para pemulung sampah yang berada disekitar wilayah TPA maupun di Kecamatan di Kota Makassar.

### **3. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pada Saat Sekarang**

Setelah vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia di TPA Tamangapa Kota Makassar dalam proses pembakaran Landfill Gas (LFG) kondisi TPA pada saat sekarang adalah volume sampah pada TPA menjadi banyak kembali, bau sampah di sekitar TPA menjadi timbul kembali seperti sebelumnya, pembangkit listrik skala kecil untuk TPA yang energi utamanya dari tenaga gas

menjadi tidak terpakai, dan yang mengelola sampah pada saat ini di TPA Tamangapa adalah pihak UPTD TPA Tamangapa dan bantuan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara peneliti dengan HS selaku Koordinator Alat Berat UPTD TPA Tamangapa :

“Vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo sangat disayangkan, karena banyaknya dampak positif dari pelaksanaan proyek pembakaran LFG ini, hingga kini yang mengelola sampah di TPA yaitu UPTD TPA Tamangapa dan bantuan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan.”

Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi TPA Tamangapa pada saat sekarang juga dikemukakan oleh TN penduduk yang tinggal disekitar TPA Tamangapa :

“Setelah melihat kondisi TPA sekarang bau sampah menjadi terasa kembali disekitar tempat tinggal saya, apalagi kalau ada mobil sampah yang lewat baunya sangat menyengat.”

A selaku pemulung yang bekerja setiap hari di TPA juga mengungkapkan hal yang sama :

“Volume sampah di TPA menjadi semakin banyak dan bisa menambah rejeki kami para pemulung, namun kalau mau mencari sampah di TPA pada saat malam hari saya takut masuk ke dalam TPA karena tidak ada penerangan cuma ada senter yang saya bawa.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kondisi TPA sekarang ini menjadi seperti sebelum pengerjaan proyek pembakaran LFG, mulai dari volume sampah yang banyak, bau sampah yang menyengat, dan tidak adanya penerangan pada TPA Tamangapa jika di malam hari.

### **V.3. Insentif**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang hal apa saja yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar kepada PT. Gikoko Kogyo agar proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas (LFG) berjalan dengan efektif. Berdasarkan ketentuan dan syarat pembangunan proyek CDM pembakaran LFG, Dinas Pertamanan dan Kebersihan menyediakan aset berupa tanah atau fasilitas kewenangan untuk membangun dan mengelola infrastruktur dan lahan yang memadai dan memberikan jaminan kelayakan sarana prasarana TPA. Untuk menjelaskan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan GS selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :

“Untuk berjalan efektifnya proyek CDM pembakaran LFG ini kami menyediakan aset berupa tanah dan lahan untuk pembangunan proyek ini sehingga dapat berjalan efektif dalam mengurangi sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar.”

SN selaku Kepala Konstruksi PT. Gikoko Kogyo Indonesia juga mengemukakan :

“Pemerintah Kota Makassar menyediakan aset berupa tanah dan lahan untuk kelangsungan proyek kami yang telah disepakati sebelumnya, pabrik kami berada di tengah TPA agar kelangsungan proyek CDM pembakaran LFG dapat berjalan dengan efektif dan dapat mengurangi jumlah volume sampah tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Makassar memberikan aset berupa tanah dan lahan yang dapat digunakan dalam membangun pabrik di TPA Tamangapa agar proyek ini dapat berjalan dengan

efektif dan dapat menangani masalah persampahan di TPA Tamangapa maupun Kota Makassar.

#### **V.4. Pendapat Masyarakat tentang Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah. Pendapat masyarakat ini peneliti membagi menjadi dua, masyarakat sekitar TPA Tamangapa dan masyarakat pemulung. Masyarakat sekitar TPA Tamangapa adalah masyarakat yang tinggal pada perumahan dan diluar wilayah TPA, sementara masyarakat pemulung yaitu para pekerja pemulung sampah yang bekerja setiap hari di TPA. Berdasarkan tujuan penelitian bahwa hasil kemitraan pengelolaan sampah yang telah sesuai dengan MOU adalah outcome yang harus dicapai pada penelitian ini. Adapun pendapat masyarakat tentang manfaat hasil pelaksanaan kemitraan pengelolaan sampah diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **V.4.1. Fasilitas Umum**

Perusahaan PT. Gikoko Kogyo menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat disekitar wilayah TPA Tamangapa Kota Makassar. Fasilitas umum ini seperti pembuatan tempat pengumpulan sampah sementara, tempat sampah organik dan nonorganik, dan penyediaan alat pengumpul sampah lainnya. Fasilitas umum ini berguna untuk mempermudah para pengangkut sampah yang sampah tersebut akan dibawa ke TPA Tamangapa sehingga sampahpun dapat berkurang disekitar wilayah TPA dan juga di Kota Makassar. Adapun pencapaian tingkat

pelayanan persampahan pada tahun 2015 yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta di Kota Makassar dalam tabel berikut ini :

**Tabel V.5**  
**Pencapaian Tingkat Pelayanan Persampahan Tahun 2015 Kota Makassar**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2015 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani 2015 (Jiwa)	Timbulan Sampah Tahun 2015 (M3/hari)	Timbulan Sampah Terangkut Tahun 2015 (M3/hari)
1	Mariso	58.597	51.565	154,77	136,13
2	Mamajang	62.968	57.930	173,39	159,89
3	Tamalate	174.772	162.538	487,61	453,48
4	Rappocini	159.776	148.592	445,78	414,57
5	Makassar	86.906	81.692	245,08	230,37
6	Ujung Pandang	29.965	29.365	88,10	86,33
7	Wajo	36.503	35.408	106,22	103,04
8	Bontoala	66.947	63.600	190,80	181,26
9	Ujung Tanah	52.777	44.861	134,58	114,40
10	Tallo	154.114	132.538	397,61	341,95
11	Panakkukang	145.773	134.074	402,22	370,04
12	Manggala	119.843	95.875	287,62	230,10
13	Biringkanaya	161.256	140.293	420,88	366,16
14	Tamalanrea	96.898	88.177	264,53	240,72
	Total Kota	1.407.055	1.266.508	3.799,59	3.428,44

*Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan 2015*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pencapaian tingkat pelayanan persampahan oleh pihak pemerintah dan swasta dapat berjalan dengan baik sebagai contoh yaitu pada kecamatan Manggala Kota Makassar timbulan sampah pada tahun 2015 berjumlah 287, 62 M3/hari dan terangkut yaitu 230,10 M3/hari. Jumlah timbulan menjadi berkurang semenjak adanya kemitraan antara pemerintah dan swasta ini. Untuk menjelaskan data diatas peneliti melakukan wawancara dengan RW selaku warga yang tinggal di Jl. Tamangapa Kassi yang menyampaikan bahwa :

“Semenjak adanya kemitraan ini banyak sekali pembuatan tempat pembuangan sampah sementara yang ada di sekitar wilayah TPA Tamangapa, dan kami sangat terbantu dengan adanya tempat sampah ini sehingga kami tidak langsung pergi membuang sampah di sana ada petugas yang langsung terjun untuk memungut sampah di tempat pembuangan sampah sementara tersebut.”

BS selaku warga yang tinggal di Jl. Tamangapa Raya juga menyampaikan hal yang sama :

“Pembuatan tempat sampah dan pembagian tempat sampah organik dan nonorganik oleh perusahaan swasta sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TPA, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hidup bersih dan terhindar dari segala macam penyakit akibat sampah yang berserakan.”

Dari data dan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan pada umumnya menurut pendapat masyarakat fasilitas umum yang disediakan oleh pihak swasta sangat berguna pula bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TPA Tamangapa Kota Makassar dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### **V.4.2. Pengurangan Masalah Bau Sampah**

Penyebab masalah bau sampah yang ada di TPA adalah sel-sel yang masih aktif sebagai tempat pembuangan sampah baru sementara sel-sel yang sudah tidak aktif atau ditutup sudah tidak mengeluarkan bau tidak sedap. Seperti yang diungkapkan oleh HS selaku Koordinator Alat Berat UPTD TPA Tamangapa :

“Penyebab bau sampah disekitar TPA adalah sampah yang baru masuk sementara sampah yang sudah ditutup dengan tanah dan diambil gasnya oleh PT. Gikoko Kogyo sudah tidak berbau lagi, sehingga bau menyengat dari sampah berkurang dan nyaman bagi masyarakat sekitar TPA Tamangapa”.

RH selaku Ketua RT 02 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar mengemukakan bahwa :

“Bau sampah disekitar sini tidak terasa pada saat musim kemarau namun kalau sudah ada truk sampah yang lewat baru bau sampah timbul kembali dan juga ceceran dari sampah dari truk tersebut, biasanya sampah yang paling bau itu sampah dari pasar, kemudian kalau sudah musim hujan bau sampahpun tercium kembali”.

YL selaku warga RT 02 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar juga mengungkapkan hal yang sama juga mengungkapkan hal yang sama :

“Bau sampah disekitar rumah saya tidak begitu terasa, sekarang juga kalau masuk di TPA bau dari tumpukan sampah tidak begitu menyengat, cuma alat yang banyak disini tidak seperti dulu yang baunya sangat menyengat sekali”.

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masalah bau sampah dapat diatasi dengan cara melakukan penutupan sel TPA sehingga bau sampah lama yang baunya menyengat dapat dikurangi walaupun tidak dapat mengatasi sepenuhnya masalah bau yang tidak sedap karena masih banyak sel aktif yang terus berfungsi dan belum dilakukan penutupan dengan tanah.

#### **V.4.3. Kegiatan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah dan Swasta**

Pada point ini peneliti akan menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan dan pihak swasta yaitu PT. Gikoko Kogyo Indonesia. Sebagaimana pembahasan sebelumnya PT. Gikoko Kogyo melakukan kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, salah satu isi dari ketentuan pembangunan dan pengelolaan proyek Clean Development Mechanism (CDM) yaitu perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia menyediakan 7% dari penjualan CER untuk mendanai program pengembangan masyarakat termasuk didalamnya industri yang



berhubungan daur ulang sampah, fasilitas umum, dan sosial masyarakat sekitar TPA Tamangapa Kota Makassar.

Kegiatan Pengelolaan sampah ini berbentuk pelatihan daur ulang sampah organik dan nonorganik, pelatihan pengelolaan sampah pengomposan, pelatihan pemilahan sampah skala rumah tangga, dan masih banyak lagi kegiatan pelatihan pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar. Tujuan dari pelatihan-pelatihan ini yaitu pemahaman sistem pengelolaan persampahan yang efektif dari program-program persampahan, pemahaman karakteristik dan teknik pengelolaan sampah, dan pemahaman dasar konstruksi dan cara kerja pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah ini difokuskan kepada masyarakat pemulung di TPA Tamangapa. Adapun pendapatan dari pemulung sampah perhari yaitu sekitar Rp 40.000,00 perhari, dan setelah adanya pelatihan tersebut pendapatan pemulung naik menjadi dua kali lipat yaitu Rp 80.000,00 perhari. Dari data tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan DC selaku pemulung yang ada di TPA Tamangapa :

“Kami para pemulung sangat bersyukur dengan adanya kemitraan ini sehingga kami bisa menambah pendapatan melalui beberapa pelatihan kreatifitas yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan setelah pelatihan tersebut kami praktek kan untuk menambah pendapatan selain memulung sampah di TPA Tamangapa.”

LA selaku pemulung sampah juga mengungkapkan hal yang sama :

“Dengan adanya kegiatan pelatihan pengelolaan sampah ini masyarakat pemulung bisa memanfaatkan sendiri sampah yang telah dipungut dengan berbagai macam kreativitas yang dapat menambah pendapatan kami selain memulung sampah.

Dari data dan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TPA Tamangapa terutama para pemulung sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini dikarenakan pendapatan dan pelatihan kreativitas yang diberikan oleh pihak swasta sangat berguna untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan menambah pendapatan mereka.

#### **V..4.4. Kemudahan Beraktifitas pada Malam Hari**

Selama masa pengoperasian sistem pembakaran Landfill Gas di TPA Tamangapa yang memusnahkan gas metan PT. Gikoko Kogyo juga memberikan kontribusi bagi penerangan disekitar TPA berupa lampu jalan yang bergantung pada energi gas dari timbunan sampah yang ada dan tentunya memberikan manfaat sendiri bagi masyarakat pemulung di TPA. Untuk menjelaskan pernyataan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan P pemulung yang beraktifitas setiap hari di TPA Tamangapa :

“Pada malam hari disini dulunya sangat terang biar ditempat lain mati lampu juga tetap terang disini, saya juga bebas berjalan-jalan di sekitar TPA untuk mencari sampah yang bisa dijual pada malam hari karena lampunya sangat terang sekali”.

Penerangan yang diberikan pada malam hari yang ada di TPA dikemukakan juga oleh TG penduduk disekitar wilayah TPA Tamangapa juga mengatakan bahwa :

“Kita beraktifitas disini siang dan malam biasa juga saya langsung datang membuang sampah di TPA pada malam hari dan terkadang saya juga takut masuk TPA karena nanti ada ular atau biawak yang masuk dalam TPA tetapi semenjak adanya penerangan ini saya tidak takut lagi masuk ke dalam TPA Tamangapa”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan pada umumnya masyarakat pemulung yang ada di TPA sangat terbantu dengan adanya penerangan, tidak takut untuk masuk ke dalam TPA dan memberikan kenyamanan kepada pemulung dan memudahkan melakukan pekerjaan pengumpulan dimalam hari.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tipe mekanisme Pemerintah Kota Makassar menjalin kerjasama dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesiadi dalam menangani sampah di Kota Makassar yang berlangsung selama 10 tahun. Adapun bantuan dana yang diberikan oleh pihak swasta yaitu 10% dari penjualan CER digunakan untuk investasi manajemen persampahan kota, dan pihak swasta juga menyediakan 7% dari hasil penjualan CER tersebut untuk mendanai program pengembangan masyarakat termasuk didalamnya industri yang berhubungan daur ulang sampah, fasilitas umum, dan sosial masyarakat sekitar TPA.

Selanjutnya, pada tipe struktur pihak swasta yakni PT. Gikoko Kogyo mengalami pemvakuman karena perjanjian ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) yang disetujui PT. Gikoko Kogyo dengan pihak Bank Dunia telah berakhir pada tahun 2015 kemudian pembayaran hasil data CER yang berasal dari hitungan jumlah gas metan yang telah dimusnahkan di TPA Tamangapa belum dapat dilakukan pembayaran oleh pihak Bank Dunia, dan hingga saat inipun proses pembakaran Landfill Gas belum dapat dijalankan untuk sementara waktu, dan inilah salah satu masalah dari hasil penelitian ini. Adapun dalam tipe insentif Pemerintah Kota Makassar memberikan aset berupa tanah dan lahan demi lancarnya proyek ini

agar berjalan efektif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pendapat masyarakat mengenai penelitian ini dari hasil pengolahan sampah serta bantuan dari pihak swasta sangat membantu dalam menangani sampah yang ada di TPA Tamangapa seperti yang telah dijelaskan dalam tipe mekanisme yaitu pada poin bantuan dana.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menyimpulkan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan Memorandum of Agreement No. MOA/05/XII.17/GKI/2007 tentang kerjasama investasi proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas (LFG) di TPA Tamangapa Kota Makassar.

Selanjutnya, adapun kondisi kemitraan dalam pengelolaan sampah pada waktu masih berjalannya proyek pembakaran LFG yang ditunjukkan pada tabel V.3 bahwa menunjukkan timbulan sampah di Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011-2015 volume sampah menjadi semakin banyak, sehingga PT. Gikoko Kogyo harus melaksanakan proyek tersebut dengan cepat agar volume atau timbulan sampah menjadi berkurang yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya, setelah melakukan proses pembakaran Landfill Gas terlihat pada tabel tersebut dari tahun 2011 hingga 2015 volume sampah menjadi berkurang. Selain itu, hasil dari pengolahan sampah ini juga berupa data Certificate Emission Reduction (CER) yang digunakan untuk investasi manajemen persampahan kota, dan pembangkit listrik skala kecil yang sangat berguna bagi masyarakat pemulung dan juga tersedianya fasilitas umum serta banyaknya pelatihan yang diadakan oleh PT. Gikoko Kogyo sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar TPA Tamangapa dan

masyarakat pemulung juga sangat berguna dan bermanfaat bagi kebersihan lingkungan TPA Tamangapa.

Namun terlepas dari bermanfaat dan bergunanya proyek tersebut, menurut peneliti masih ada yang kurang dalam hasil penelitian ini seperti vakumnya perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia karena perjanjian ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) yang disetujui PT. Gikoko Kogyo dengan pihak Bank Dunia telah berakhir pada tahun 2015 kemudian pembayaran hasil data CER yang berasal dari hitungan jumlah gas metan yang telah dimusnahkan di TPA Tamangapa belum dapat dilakukan pembayaran oleh pihak Bank Dunia, dan hingga saat inipun proses pembakaran Landfill Gas belum dapat dijalankan untuk sementara waktu, dan menurut peneliti tidak ada kejelasan mengenai waktu tersebut sampai kapan akan berjalan lagi proses proyek CDM ini sementara sampah dari aktivitas sehari-hari masyarakat di sekitar wilayah TPA Tamangapa dan juga Kota Makassar semakin lama semakin menumpuk dan masalah lain dari proyek inipun menurut peneliti terlihat pula pada bau sampah yang kembali menyengat, dan tidak adanya penerangan di TPA Tamangapa kalau malam hari, serta sarana dan prasarana TPA Tamangapa yang rusak terutama pada alat berat sehingga terhambat pula pengerjaan penutupan sel TPA Tamangapa yang akan menjadi dasar dari proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG).

## **VI.2. Saran**

Adapun saran yang akan peneliti berikan pada hasil penelitian Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Makassar dan PT. Gikoko Kogyo Indonesia memastikan kapan bisa berjalan kelanjutan proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui pembakaran Landfill Gas (LFG) agar timbunan sampah di TPA Tamangapa dan Kota Makassar bisa menurun kembali.
2. Perbaiki manajemen persampahan seperti sarana dan prasarana yang sudah lama dan banyak yang rusak di TPA Tamangapa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adisasmita, Rahardjo, 2010. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bell, Dennis dan Watkins, 1996. *An Introduction to The Study of Public Policy*. 2end. Duxbury Press, Ed. North Scituate.
- Bryden, Roger, 1998. *The Science Implementation of Public Policy*, Prentice Hall, New York.
- Christensen, J. and Leargreid, P. 2001. *New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice*. Aldershot: Ashgate.
- Denhardt, Janet V., and Denhardt, Robert B., 2003. *The NewPublic Service: Serving, Not Steering*, M.E. Sharpe, New York, London, England.
- Dwiyanto, Agus, 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effeindi, Sofian, 2001. *Pengembangan Good Governance dan e-Governance di Era Otonomi Daerah*: Jakarta.
- Farasmand, Ali, 2004. *Sound Governance: Policy and AdministrativeInnovation*, Praeger Publisher, 88 Post Road West, New York.
- Keban, Yeremis T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kapucu Naim, Farhod Yuldahev, Erlan Bakiev, 2009. *Collaborative Public Management and Collaborative Governance: Conceptual Similarities and Differences*. Europa Journal of Economi and Political Studies Ejep-2.39-60.
- Mahmud, Khalid, 2001. *Shanghai Cooperation Organization: Beginning of A New Partnership*, Regional Studies, Vol XX, No. 1, Winter, pp 3-18.
- Michael Hall, 1999. *Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective*. Journal Vol. 7 Nos 3-4.
- Mardalis. 2010. "Metode Penelitian". Jakarta; Bumi Aksara



- Osborne, David and Gabler Ted, 1992. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Service*, New York.
- Pierre, Jon And B. Guy Peters, 2000. *Governance, Politic and The State*, Micmillan Press Ltd. London.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ramelan, Rahardi, 1997. *Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, Koperasi Jasa Profesi LPPN/INDES, Jakarta.
- Rondinelli Dennis, 2002. *Public-Private Partenership* Dalam Kirkpatrick, Colin Clark & Charles Polidano, *Handbook on Development Policy and Management*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
- Savas, Emanuel S. 1987. *Privatization: The Key to Better Government*, Chatam House Publishers, Inc, New Jersey
- Sugiyono, 2010. *Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yeskombe, E.R. 2007. *Public–Private Partnerships :Principles of Policy and Finance*.Elseifer. London-UK.

## INTERNET

- Asrul, Muhammad. 2016. **“Pak Camat ! Sampah di Kanal Buloa-Kaluku Badoa Nauzubillah. Ini Fotonya, Liat ki...”**(<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/06/18/pak-camat-sampah-di-kanal-buloa-kaluku-badoa-nauzubillah-ini-fotonya-liat-ki/>) diakses pada tanggal 23 November 2016
- <http://makassar.tribunnews.com/2017/02/19/pak-kadis-kok-sampah-jl-rajawali-jl-cendrawasih-belum-diangkut>. (Diakses pada tanggal 27 Februari 2017)
- <http://www.beritasatu.com/nasional/256408-makassar-diprediksi-dikepung-sampah-pada-2020.html>. (Diakses pada tanggal 27 Februari 2017)

## **SKRIPSI**

Nurelsan, Muh. Aprisal. 2016. **Responsivitas Pelayanan Persampahan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.** Makassar : Universitas Hasanudin.

## **TESIS**

Nahrudin, Zulfan. 2014. **Kemitraan Publik-Privat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar.** Makassar : Universitas Hasanudin

Uji, A.Yanti Tenri. 2015. **Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka.** Makassar : Universitas Hasanudin.

## **DISERTASI**

K. Rumfaker, Maurits. 2016. **Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata Selat Dampir Kabupaten Raja Ampat.** Makassar : Universitas Hasanudin.

# LAMPIRAN

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Nama** : M. Febri Zulkarnain

**Tempat dan Tanggal Lahir** : Palembang, 18 Februari 1995

**Alamat** : Jl. Cumi-cumi Timur No. 62 Makassar

**Nomor Telepon** : 0812 4321 2606

**Nama Orang Tua** : Ayah : Muhammad Aspah  
Ibu : Indo Ralle

**Pekerjaan Orangtua** : Ayah : Pegawai Swasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

**Riwayat Pendidikan Formal** :

1. SD : SD Negeri 4 Kenten Laut (2001-2007)
2. SMP : SMP Negeri 41 Palembang (2007-2010)
3. SMA : SMA YPI Tunas Bangsa Palembang (2010-2013)
4. Universitas Hasanudin FISIP Departemen Ilmu Administrasi 2013

**Pengalaman Organisasi** :

1. Anggota Humanis Fisip Unhas
2. Anggota Departemen Komunikasi dan Informasi Humanis Fisip Unhas (2015-2016)
3. Koordinator Bidang Pertandingan UKM Bola Basket Fisip Unhas (2015-2016)

## 1. Peta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar



## 2. Pabrik PT. Gikoko Kogyo Indonesia Makassar



### 3. Situasi Sampah di TPA Tamangapa



#### 4. Standar Operasional Prosedur TPA Tamangapa



## 6. Rekapitulasi Volume Pembuangan Sampah

**REKAPITULASI VOLUME PEMBUANGAN SAMPAH**

**TAHUN 2010**

NO	KELOMPOK SAMPAH	UNIT	WILAYAH
1	Sampah Plastik	100.000.000	11.420
2	Sampah Kertas	1.000.000.000	100.000
3	Sampah Logam	1.000.000.000	100.000
4	Sampah Kayu	1.000.000.000	100.000
5	Sampah Kulit	1.000.000.000	100.000
6	Sampah Kulit Hewan	1.000.000.000	100.000
7	Sampah Kulit Ikan	1.000.000.000	100.000
TOTAL			327.520.000

**TAHUN 2011**

NO	KELOMPOK SAMPAH	UNIT	WILAYAH
1	Sampah Plastik	100.000.000	11.420
2	Sampah Kertas	1.000.000.000	100.000
3	Sampah Logam	1.000.000.000	100.000
4	Sampah Kayu	1.000.000.000	100.000
5	Sampah Kulit	1.000.000.000	100.000
6	Sampah Kulit Hewan	1.000.000.000	100.000
7	Sampah Kulit Ikan	1.000.000.000	100.000
TOTAL			327.520.000

**TAHUN 2012**

NO	KELOMPOK SAMPAH	UNIT	WILAYAH
1	Sampah Plastik	100.000.000	11.420
2	Sampah Kertas	1.000.000.000	100.000
3	Sampah Logam	1.000.000.000	100.000
4	Sampah Kayu	1.000.000.000	100.000
5	Sampah Kulit	1.000.000.000	100.000
6	Sampah Kulit Hewan	1.000.000.000	100.000
7	Sampah Kulit Ikan	1.000.000.000	100.000
TOTAL			327.520.000

**TAHUN 2013**

NO	KELOMPOK SAMPAH	UNIT	WILAYAH
1	Sampah Plastik	100.000.000	11.420
2	Sampah Kertas	1.000.000.000	100.000
3	Sampah Logam	1.000.000.000	100.000
4	Sampah Kayu	1.000.000.000	100.000
5	Sampah Kulit	1.000.000.000	100.000
6	Sampah Kulit Hewan	1.000.000.000	100.000
7	Sampah Kulit Ikan	1.000.000.000	100.000
TOTAL			327.520.000

**TAHUN 2014**

NO	KELOMPOK SAMPAH	UNIT	WILAYAH
1	Sampah Plastik	100.000.000	11.420
2	Sampah Kertas	1.000.000.000	100.000
3	Sampah Logam	1.000.000.000	100.000
4	Sampah Kayu	1.000.000.000	100.000
5	Sampah Kulit	1.000.000.000	100.000
6	Sampah Kulit Hewan	1.000.000.000	100.000
7	Sampah Kulit Ikan	1.000.000.000	100.000
TOTAL			327.520.000

**TAHUN 2015**

NO	KELOMPOK SAMPAH	UNIT	WILAYAH
1	Sampah Plastik	100.000.000	11.420
2	Sampah Kertas	1.000.000.000	100.000
3	Sampah Logam	1.000.000.000	100.000
4	Sampah Kayu	1.000.000.000	100.000
5	Sampah Kulit	1.000.000.000	100.000
6	Sampah Kulit Hewan	1.000.000.000	100.000
7	Sampah Kulit Ikan	1.000.000.000	100.000
TOTAL			327.520.000

**TAHUN 2016**

NO	KELOMPOK SAMPAH	UNIT	WILAYAH
1	Sampah Plastik	100.000.000	11.420
2	Sampah Kertas	1.000.000.000	100.000
3	Sampah Logam	1.000.000.000	100.000
4	Sampah Kayu	1.000.000.000	100.000
5	Sampah Kulit	1.000.000.000	100.000
6	Sampah Kulit Hewan	1.000.000.000	100.000
7	Sampah Kulit Ikan	1.000.000.000	100.000
TOTAL			327.520.000

## 7. Data Penimbangan Berat Sampah dan Retasi Kendaraan 2016-2017

**DATA PENGIMBANGAN BERAT SAMPAH DAN RETASI KENDARAAN 2016-2017**

JENIS NOMBOR	BULAN												ST
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1 DUMP TRUK													
2 ARM ROLL													
3 TANGKAS													
SWASTA													
PUSKUDA													

**KETERANGAN**

DUMP TRUK  
 ARM ROLL